



LAPORAN DELEGASI DPR RI

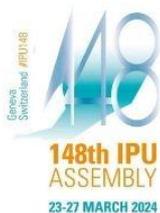


148th INTER-PARLIAMENTARY UNION ASSEMBLY AND RELATED MEETINGS

JENEWA, SWITZERLAND
23-27 MARET 2024



Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.





**LAPORAN
DELEGASI DPR RI**

**148TH INTER-PARLIAMENTARY UNION (IPU)
GENERAL ASSEMBLY AND RELATED
MEETINGS**

Jenewa, Switzerland
23-27 Maret 2024

I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Inter-Parliamentary Union (IPU) merupakan organisasi parlemen global yang beranggotakan 180 parlemen negara. Forum tertinggi IPU adalah IPU General Assembly atau Sidang Umum IPU. IPU Assembly ini merupakan sebuah ajang dari organisasi atau badan pembuat keputusan yang mewadahi parlemen. Pada saat ini, IPU adalah satu-satunya organisasi yang mewakili sisi legislative yang berskala global. Sidang IPU ke-148 mengangkat tema keseluruhan yang berjudul “*Parliamentary diplomacy: Building bridges for peace and understanding*”, diselenggarakan di Jenewa, Switzerland, Gedung *International Conference Center Geneva* (CICG) pada tanggal 23-27 Maret 2024.

Kehadiran dan partisipasi DPR RI dalam Sidang IPU ke-148 ini juga merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang yang mengatur terkait diplomasi parlemen, termasuk Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau biasa disebut UU MD3, yang menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat merupakan lembaga perwakilan rakyat yang di antara lainnya untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pasal 4 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menegaskan bahwa tiga fungsi DPR RI, yaitu pengawasan, penganggaran, legislasi dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) sebagai Alat Kelengkapan DPR RI diberi mandat untuk menjalankan diplomasi parlemen. Sesuai dengan Pasal 116 UU MD3 dan Pasal 82 Tata Tertib DPRRI Tahun 2020, tugas BKSAP antara lain: membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerja sama antara DPR dan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral termasuk organisasi internasional yang menghimpun parlemen.

BKSAP merupakan *focal point* diplomasi parlemen DPR RI dalam berbagai forum internasional termasuk Sidang Umum IPU. BKSAP DPR RI telah secara rutin mengirimkan delegasi di Sidang Umum IPU yang diselenggarakan dua kali dalam satu tahun. Pada Sidang Umum IPU ke-148 kali ini, DPR RI selalu berprinsip untuk memperjuangkan kepentingan nasional dan menjalankan misi untuk turut serta



membahas berbagai tantangan dunia termasuk perdamaian seperti mandat UUD 1945. Selain itu, keikutsertaan DPR RI dalam sidang tersebut juga bagian dari upaya untuk memelihara hubungan bilateral dan multilateral dengan parlemen Anggota IPU dan berbagai organisasi internasional yang hadir.



Gambar 1.0 Delegasi BKSAP DPR RI menghadiri sidang IPU ke-148 yang bertempat di Gedung *International Conference Center Geneva* (CICG), Jenewa, Switzerland

B. DASAR PENGIRIMAN DELEGASI

Partisipasi Delegasi DPR RI pada Sidang IPU ke 148 ini berdasarkan :

1. Surat Tugas Nomor 09/KU.05.01/KSOI/ST/03/2024 tentang Perjalanan Dinas dalam rangka menghadiri Sidang IPU ke-148.

C. SUSUNAN DELEGASI

Adapun susunan dan komposisi Delegasi DPR RI ke Sidang IPU ke-148 adalah sebagai berikut:

No	Nama	Fraksi/ Nomor Anggota	Jabatan / Posisi
1.	Dr. (HC) Puan Maharani	F-PDIP/A-188	Ketua DPR RI /Ketua Delegasi
1.	Dr. Fadli Zon, SS, M.Sc.	F-P.Gerindra/A-86	Ketua BKSAP DPR RI /Anggota Delegasi
2.	Gilang Dhielafararez, S.H., LL.M.	F-PDIP/A-179	Wakil Ketua BKSAP /Anggota Delegasi
3.	Putu Supadma Rudana, MBA	F-PD/A-563	Wakil Ketua BKSAP /Anggota Delegasi
4.	Dr. H. Sukamta	F-PKS/A-445	Wakil Ketua BKSAP /Anggota Delegasi
5.	Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos, MCOMN&MEDIAS	F-PDIP/A-262	Anggota BKSAP /Anggota Delegasi
6.	Charles Honoris	F-PDIP/A-162	Anggota BKSAP /Anggota Delegasi
7.	Agustina Wilujeng Pramestuti, S.S.	F-PDIP/A-185	Anggota BKSAP /Anggota Delegasi
8.	Vanda Desy Sarundajang	F-PDIP/A-254	Anggota BKSAP /Anggota Delegasi
9.	H. Andi Achmad Dara	F-P.Golkar/A-326	Anggota BKSAP /Anggota Delegasi
10.	Melchias Markus Mekeng	F-P.Golkar/A-330	Anggota BKSAP /Anggota Delegasi
11.	Ratih Megasari Singkaru M.Sc.	F-P.Nasdem/A-402	Anggota BKSAP /Anggota Delegasi
12.	Ema Umriyatul Chusnah	F-PPP/A-471	Anggota BKSAP /Anggota Delegasi

Selama persidangan berlangsung, Delegasi DPR RI didampingi oleh jajaran Staff khusus, Pejabat, Staff Setjen DPR RI dan Tenaga Ahli BKSAP.

D. MAKSUD DAN TUJUAN PENGIRIMAN DELEGASI

1. Maksud

Maksud dari pengiriman Delegasi DPR RI mengikuti Sidang IPU ke-148 adalah:

- a. Memperkuat persahabatan dan meningkatkan kerja sama baik secara multilateral maupun bilateral dengan negara-negara anggota IPU beserta organisasi internasional yang hadir di Sidang IPU;
- b. Memperjuangkan berbagai isu internasional yang sejalan dengan kepentingan nasional sehingga menghasilkan resolusi-resolusi yang implementatif dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan dunia.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan dari pengiriman Delegasi DPR RI ke Sidang IPU ke-148 adalah:

- a. Berpartisipasi aktif dalam Sidang Umum IPU ke-148 sesuai mandat diplomasi parlemen;
- b. Penguatan peran diplomasi parlemen Indonesia di forum parlemen dunia;
- c. Mengembangkan strategi bersama dengan delegasi parlemen yang hadir untuk implementasikan resolusi-resolusi yang telah diadopsi, dan memecahkan tantangan yang dihadapi bersama.



Gambar 1.1 Ketua DPR RI, Dr. (HC) Puan Maharani dan Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon dalam sidang IPU148 di Jenewa, Switzerland

E. MISI DELEGASI

Delegasi DPR RI ke Sidang IPU ke-148 mengemban misi untuk :

1. Memperjuangkan Agenda Darurat (*Emergency Item*) sebagai upaya diplomasi untuk menghentikan perang di Gaza melalui *Draft Resolution* bertajuk *Parliamentary Diplomacy for Peace in Palestine*.
2. Memperjuangkan usulan atau rekomendasi delegasi DPR RI terhadap resolusi yang berjudul “*Partnership for climate action: Promoting access to affordable green energy, and ensuring innovation, responsibility and equity*” dalam komite Pembangunan Berkelanjutan IPU.
3. Mempromosikan agenda *Parliamentary Meeting on the Occasion of the 10th World Water Forum* yang akan dilaksanakan pada tanggal 19-22 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali.

F. PERSIAPAN PELAKSANAAN TUGAS

Serangkaian kegiatan dilakukan pada masa persiapan partisipasi Delegasi DPR RI pada Sidang IPU ke-148, baik persiapan teknis maupun persiapan substansi. Guna kelancaran tugas Delegasi dari segi teknis, Sekretariat BKSAP menyiapkan sarana dan prasarana yang mendukung bagi keikutsertaan Delegasi selama sidang berlangsung. Sementara dari segi substansi, Sekretariat bersama Staff Khusus dan Tenaga Ahli telah menyusun rancangan resolusi dan posisi delegasi.



Gambar 1.2 Ketua DPR RI, Dr. (HC) Puan Maharani, didampingi oleh anggota BKSAP Agustina Wilujeng, Charles Honoris, dan Vanda Desy Sarundajang dalam sidang IPU ke-148



II ISI LAPORAN

A. AGENDA SIDANG

Berikut adalah agenda Sidang Umum IPU ke-148 bagi delegasi DPR RI yang mengambil tema “*Parliamentary diplomacy: Building bridges for peace and understanding*”, diselenggarakan di Jenewa, Switzerland, Gedung *International Conference Center Geneva* (CICG) pada tanggal 23-27 Maret 2024 adalah sebagai berikut:

Thursday, 21 March 2024	Venue
10:00 – 13:00 Executive Committee*	IPU Headquarters
13:15 – 14:35 Executive Committee Lunch	
15:00 – 18:00 Executive Committee*	IPU Headquarters

Friday, 22 March 2024	Venue
12:00 – 19:00 Beginning of Registration	Lobby CICG
10:00 – 13:00 Executive Committee*	IPU Headquarters
19:30 Executive Committee Dinner	Restaurant Perle du Lac

Saturday, 23 March 2024	Venue
08:30 – 09:00 ASEAN+3 Meeting	
09:30 – 10:00 Bilateral Meeting dengan Presiden IPU	VIP Suites, 3rd floor, CICG
09:00 – 11:00 Asia-Pacific Group (APG) Meeting	Plenaries B&C
09:00 – 10:00 Bureau of Women Parliamentarians*	Salle Geneve
10:00 – 11:00 Meeting of Advisers and Secretaries to delegations	Plenaries E&F, 3rd floor
11:30 – 13:30 PUIC Meeting	Plenaries E&F, 3rd floor
10:30 – 13:00 Forum of Women Parliamentarians	Plenary A, Level 0
13:30 – 14:00 Bilateral Meeting dengan Parlemen Tunisia	
14:00 – 15:00 Bilateral Meeting dengan Parlemen Myanmar	
14:30 – 17:30 Forum of Women Parliamentarians	Plenary A, Level 0
15:00 – 16:30 Asian Parliamentary Assembly (APA) Meeting	Plenaries E&F, 3rd floor



18:00 Dinner dan Buka Puasa bersama di PTRI Jenewa	Wisma Watapri La Capite
--	-------------------------

Sunday, 24 March 2024	Venue
09:00 – 11:00 Governing Council	Ampitheatre D, Level 1 CICG
09:00 – 12:00 Standing Committee on Peace and International Security: Debate and start of drafting in plenary of the draft resolution on <i>Addressing the social and humanitarian impact of autonomous weapon systems and artificial intelligence</i>	Plenary A, Level 0
09:00 – 10:30 Young Parliamentarians of the IPU	Hybrid Meeting
09:00 – 12:30 Standing Committee on Sustainable Development: Debate and start of drafting in plenary of the draft resolution on <i>Partnership for climate action: Promoting access to affordable green energy, and ensuring innovation, responsibility, and equity</i>	Plenary B&C, Level 0
10:30 – 11:30 Bilateral Meeting dengan parlemen Vietnam	
11:00 – 12:30 ASGP Meeting	Plenaries E&F, 3 rd Floor
11:00 – 12:30 Assembly: Opening and start of the General Debate on Parliamentary Diplomacy: Building bridges for peace and understanding	Ampitheatre D, Level 1 CICG
11:30 – 13:00 Bureau of the Standing Committee on Democracy and Human Rights*	Salle Lausanne, CCV Annexe building
12:00 – 12:30 Bilateral dengan Parlemen Swedia	
12:30 - 13:30 Lunch dalam rangka persiapan Sidang IPPP	Restaurant CICG
14:00 - 17:00 Standing Committee on Peace and International Security Drafting in plenary of the draft resolution on <i>Addressing the social and humanitarian impact of autonomous weapon systems and AI</i>	Plenary A, Level 0
14:30 – 17:00 Assembly: General Debate	Amphitheatre D, Level 1 CICG
14:30 – 17:30 Forum of Young Parliamentarians of the IPU	Plenary B&C, level 0 / Hybrid
14:30 – 17:30 Committee on Middle East Question*	Salle 4, Level 1



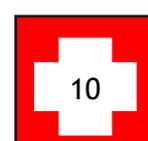
14:30 – 17:30 ASGP Meeting	Plenaries E&F, 3 rd Floor
17:00 – 18:30 Assembly: Decision on the emergency item	Amphitheatre D, Level 1 CICG
19:00 Reception offered by Switzerland Government	

Monday, 25 March 2024	Venue
09:00 – 13:00 Assembly: 09:00 – 10:30 – Debate on the Emergency Item 10:30 – 13:00 – Continuation of the General Debate	Amphitheatre D, Level 1 CICG
09:00 – 13:00 Standing Committee on Peace and International Security: Completion of drafting in plenary of the draft resolution on <i>Addressing the social and humanitarian impact of autonomous weapon systems and artificial intelligence</i>	Plenary A, Level 0
09:30 – 12:30 Standing Committee on Democracy and Human Rights Debate on the draft resolution to be adopted at the 149 th Assembly on <i>The Impact of AI on democracy, human rights and the rule of law</i>	Plenary B&C, level 0
10:00 – 12:30 ASGP Meeting	Plenary B&C, level 0
12:30 – 13:30 Bilateral Meeting dengan Parlemen Ukraina	
13:30 – 14:30 Bilateral Meeting dengan Parlemen Belarusia	Salle 3 Level -1
14:30 – 17:00 Task Force on the peaceful resolution of the war in Ukraine*	Salle Geneve, CCV Annexe building
17:15 – 18:00 Bilateral Meeting dengan UNRWA	
14:30 – 17:30 ASGP Meeting	Plenaries E&F, 3 rd Floor
14:30 – 18:00 Assembly : Continuation of the General Debate	Amphitheatre D, Level 1 CICG
14:30 – 18:30 Standing Committee on Sustainable Development Completion of drafting in plenary of the draft resolution on <i>Partnership for climate action : Promoting access to affordable green energy, and ensuring innovation, responsibility and equity</i>	Plenary A, Level 0



14:30 – 18:30 Possible drafting committee on the Emergency Item*	Salle Lausanne, CCV Annexe building
17:00 – 18:30 Gender equality in politics: Achievements and the way forward	Room 4 Level 1
17:30 The 3rd Conference of NAM on the topic <i>Revitalizing parliamentary action in combating climate change</i>	Hotel President Wilson Ballroom

Tuesday, 26 March 2024	Venue
09:00 – 10:30 Committee on Middle East Question*	Salle 4, Level 1
09:00 – 11:00 Bureau of the Standing Committee on Peace and International Security*	Salle Lausanne, CCV Annexe building
14:30 – 16:30 Standing Committee on Peace and International Security Adoption of the draft resolution on <i>Addressing the social and humanitarian impact of autonomous weapon systems and artificial intelligence</i>	Plenary A, Level 0
14:30 – 16:30 Standing Committee on the United Nations Affairs	Plenary B&C, level 0
14:30 – 17:30 ASGP Meeting	Plenaries E&F 3 rd Floor
14:30 – 18:00 Assembly : Adoption of the resolution on the Emergency Item and Special Session on accountability in the implementation of IPU Decisions and Conclusion of the General Debate	Amphitheatre D, Level 1 CICG
16:30 – 18:30 Working Group on amendments to the Statutes and Rules*	Salle Geneve, CCV Annexe
17:00 – 18:30 Standing Committee on Sustainable Development Adoption of the draft resolution on <i>Partnership for climate action : Promoting access to affordable green energy, and ensuring innovation, responsibility and equity</i>	Plenary B&C, level 0
18:30 - 20:00 Youth Leaders Meetup	Espace Riviera CCV Annexe CICG



Tuesday, 26 March 2024	Venue
09:00 – 11:00 Bureau of Women Parliamentarians*	Salle 4, Level 1
09:00 – 13:00 Governing Council Decisions on the human rights of MPs and Reports of specialized meetings	Amphitheatre D, Level 1 CICG
14:30 – Governing Council	Amphitheatre D, Level 1 CICG
Closing - Assembly : Adoption of resolutions Reports of the Standing Committees Outcome document of the General Debate Closing sitting	Amphitheatre D, Level 1 CICG

Sidang IPU ke-148 juga mempunyai agenda utama pembahasan yaitu:

1.	Election of the President of the 148th Assembly
2.	Consideration of requests for the inclusion of an emergency item in the Assembly agenda
3.	General Debate on the theme <i>Parliamentary diplomacy: Building bridges for peace and understanding</i>
4.	Special accountability segment on the implementation of IPU resolutions and other decisions
5.	Addressing the social and humanitarian impact of autonomous weapon systems and artificial intelligence (Standing Committee on Peace and International Security)
6.	Reports of the Standing Committees
7.	Approval of the subject item for the Standing Committee on Peace and International Security and for the Standing Committee on Sustainable Development for the 150 th Assembly and appointment of the co-Rapporteurs

B. PARTISIPASI DELEGASI DALAM SIDANG

Sidang IPU ke-148 yang mengambil tema “*Parliamentary diplomacy: Building bridges for peace and understanding*”, diselenggarakan di Jenewa, Switzerland, pada tanggal 23-27 Maret 2023. Delegasi DPR RI menghadiri dan berperan aktif dalam berbagai sesi-sesi persidangan sebagai berikut:

1. EXECUTIVE COMMITTEE

Para anggota Executive Committee (Excom) bertemu sejak Kamis (22/3), di Markas IPU, Chemin du Pommier, Geneva. Pertemuan membahas sejumlah agenda dengan sejumlah keputusan dan simpulan sebagai berikut:

1. Presiden IPU sekaligus Ketua Parlemen Republik Tanzania, H.E. Mme. Tulia Ackson, menggarisbawahi perlunya kegiatan-kegiatan IPU tersampaikan ke seluruh anggota parlemen agar partisipasi pada acara-acara IPU dapat terpenuhi. Untuk itu Tulia menyarankan agar informasi kegiatan IPU dapat disampaikan tidak hanya kepada perwakilan IPU di parlemen nasional/komite/badan terkait tetapi juga kepada Ketua Parlemen.



Gambar 2.0 Presiden IPU sekaligus Ketua Parlemen Tanzania, H.E. Mme. Tulia Ackson memimpin pertemuan Executive Committee dengan didampingi Sekretaris Jenderal IPU, Mr. Martin Chungong dalam sidang IPU ke-148

2. Diskusi awal terkait Kantor Regional IPU mengemuka manakala Executive Committee melakukan riviur lanjutan dari ringkasan pertemuan Excom sebelumnya. Sekretaris Jenderal IPU, Mr. Martin Chungong menyampaikan keputusan Governing Council saat IPU ke-145 di Kigali, Rwanda yang menyetujui permintaan Uruguay dan Mesir untuk menjadi tuan rumah Kantor Regional IPU. Sekretariat IPU menyepakati pendirian Kantor Regional sebagai uji coba awal selama dua tahun dan setelahnya akan dilakukan asesmen untuk kebijakan lanjutan. Wakil Presiden Excom, Mrs. B Argimon (Uruguay) menolak anggapan uji coba dan menyebut kantor tersebut sebagai *pilot project* atas upaya grup geopolitik mendekatkan IPU dengan anggota parlemen di kawasan.
3. Presiden IPU menyampaikan sejumlah laporan kegiatan setelah penyelenggaraan IPU ke-147 di Luanda, Angola. Kunjungan resmi pertama

Presiden IPU adalah ke Israel dan Palestina bertemu dengan kedua belah pihak dan mendengar persepsi akan konflik yang terjadi. Selain itu, Presiden IPU juga berpartisipasi dalam sejumlah aktivitas termasuk menyampaikan pandangan dalam 9th MIKTA Speakers Consultation, 2023, di Bali, dan juga menghadiri Antalya Diplomacy Forum.

4. Sekretariat IPU menyampaikan *Impact Report 2023* yang berisi pencapaian-pencapaian IPU pada tahun 2023. IPU juga akan terus melakukan advokasi dan pengembangan-pengembangan produk lainnya dengan contoh [10 Actions for Greener Parliaments](#) yang dapat menjadi upaya-upaya IPU mendorong parlemen yang demokratis dan adaptif terhadap lingkungan.
5. Dalam hal keuangan, Chair Sub-Committee on Finance, Excom, Dr. Ali Al-Nuaimi (UAE), menerangkan keuangan IPU pada tahun 2023 berakhir dengan surplus lebih dari CHF 120.000. Sub Komite mencatat ada kenaikan secara stabil tunggakan kontribusi dari parlemen dengan Venezuela menjadi yang terbesar mencapai sekitar CHF 662.000. Berdasarkan audit keuangan yang dilakukan pihak eksternal, yakni Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk tahun 2023, situasi finansial IPU terbilang baik.
6. Terkait kontribusi sukarela, Sekretariat Jenderal IPU menyampaikan, total pendanaan mencapai 27% dari total anggaran pada tahun 2023. Sementara kontribusi sukarela/pendanaan eksternal pada 2024 ini mencapai 23%. Sekretariat IPU menyampaikan, baru saja menerima pendanaan lanjutan dari UAE senilai US\$ 1 juta. Saat ini IPU juga tengah melakukan negosiasi/penjajakan ulang dengan sejumlah donor seperti SIDA (Swedia), dan Kanada. Kontribusi lain tercatat diberikan oleh Tiongkok, Bangladesh, Benin, Qatar, hingga dari UN System.



Gambar 2.1
Pimpinan BKSAP
DPR RI menyapa
Presiden IPU
periode
sebelumnya, Mr.
Duarte Pacheco,
pada sela-sela
sidang IPU ke-
148 di Jenewa

7. IPU juga menerima kontribusi *in-kind* berupa dukungan pembiayaan staf/penempatan staf atau pun dukungan lain dari parlemen negara terkait ke IPU seperti dari Korea Selatan (penempatan staf di IPU atas biaya

Parlemen), Mesir, Austria (penempatan Kepala Kantor IPU Austria dengan biaya dari Austria).

8. Terkait penyelenggaraan IPU ke-148, Sekretariat IPU menyampaikan sedikitnya 148 delegasi telah mendaftarkan diri (hampir menjadi rekor kehadiran peserta IPU), 55 Ketua Parlemen, dan 50 Wakil Ketua hadir. Dengan komposisi delegasi parlemen perempuan mencapai 36% dan parlemen muda mencapai 27%. Sejauh ini (per 22 Maret 2024), belum ada submisi rancangan *emergency item* yang disampaikan.
9. Wakil Presiden Excom, Dr Ali Al Nuaimi mengharapkan agar *emergency item* yang diajukan (apabila ada), berdasarkan atas penghormatan terhadap nilai-nilai dan prinsip komunitas internasional.
10. Sekretariat IPU menyampaikan menerima banyak usulan perubahan Statuta IPU. Untuk itu telah membentuk sebuah kelompok kerja diwakili dari masing-masing grup geopolitik untuk membahas lebih lanjut usulan terkait.
11. IPU juga mendengar catatan laporan dari Task Force Ukraina dan juga Committee on the Middle East Questions dan mengharapkan progress akan dapat terjadi di waktu-waktu ke depan.
12. Komite Eksekutif akan bertemu kembali di luar jadwal *Assembly* sekitar Juni 2024, dengan lokasi dan waktu masih tentatif.
13. IPU membahas situasi spesifik terhadap parlemen sejumlah negara dengan hasil sebagai berikut:
 - **Afghanistan** (mempertahankan keputusan sebelumnya Afghanistan dapat berpartisipasi dalam kapasitas pengamat non-voting).
 - **Guinea-Bissau** (merekomendasikan agar IPU berinteraksi dengan parlemen saat ini).
 - **Haiti** (menyampaikan harapan kuat agar proses konstitusional berjalan sesuai jalurnya).
 - **Myanmar** (mempertahankan keputusan sebelumnya agar Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) Myanmar menjadi mitra bicara dan berpartisipasi dalam kapasitas pengamat non-voting).
 - **Niger** (menyepakati memonitor perkembangan situasi).
 - **Sudan** (Menyepakati untuk tetap melakukan *suspend* keanggotaan dan memantau situasi).



- Situasi Parlemen Transitional yakni di **Burkina Faso, Chad, Gabon, Guinea, Mali, South Sudan** (menyepakati untuk terus memonitor dan menjaga untuk terus berinteraksi dengan parlemen-parlemen tersebut).
- **Libya** (mencatat perkembangan positif dan menyatakan perlunya pemilihan umum yang sesuai jadwal agar Libya dapat memiliki parlemen yang berfungsi penuh).
- **Palestine** (menyepakati kebijakan IPU sebelumnya terkait Palestina).
- **Venezuela** (menyepakati pembahasan dilanjutkan pada pertemuan Excom di luar jadwal Assembly sembari menunggu perkembangan pemilihan umum).
- **Yaman** (mempertimbangkan situasi yang berlangsung di Yaman).
- Beberapa perkembangan politik yang berpotensi melemahkan kehidupan berparlemen yakni di Bosnia Herzegovina (BiH), Eswatini, Peru, Suriah (menyepakati IPU untuk terus memonitor situasi terkini).

2. ASEAN+3 MEETING

Grup geopolitik ASEAN+3 bertemu pada Sabtu (23/3), pukul 08.30 waktu setempat di Plenary B, CICG. Ketua Komisi Luar Negeri Parlemen Lao PDR, Sanya Praseuth memimpin jalannya pertemuan. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Gilang Dhielafararez, menghadiri pertemuan tersebut.

Parlemen ASEAN+3 menyepakati sejumlah agenda dan juga pengisian jabatan untuk lowongan yang tersedia dan dapat diisi oleh Grup Asia Pasifik.

Thailand mengajukan Mr. K Suebsang sebagai nominasi untuk mengisi jabatan Committee to Promote Respect for International Humanitarian Law. Pada kesempatan tersebut, DPR RI juga menginformasikan adanya agenda pertemuan parlemen terkait isu air, yakni ***Parliamentary Meeting at the 10th World Water Forum***, yang akan digelar pada 19-22 Mei 2024. Gilang menyampaikan undangan untuk dua anggota parlemen per negara untuk menghadiri dan berinteraksi dalam isu-isu air di Bali. Undangan disambut dengan baik oleh para peserta rapat.



Gambar 2.2 Dalam sidang IPU ke-148 ini, delegasi DPR RI turut mempromosikan kegiatan *Parliamentary Forum on the Occasion of the 10th World Water Forum* yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 19-22 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali untuk mendorong keikutsertaan para anggota parlemen IPU

3. ASIA PACIFIC GROUP (APG) MEETING

Grup Asia Pasifik bertemu pada Sabtu (23/3), pukul 09.00 waktu setempat di Lantai 3 E&F, CIGG. Ketua Parlemen Bangladesh, Dr. Shirin Sharmin Chaudhury MP, memimpin jalannya rapat. Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon dan Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Gilang Dhielafararez menghadiri agenda tersebut.

Pertemuan berlangsung dengan sejumlah kesimpulan sebagai berikut:

- APG sepakat mengusung kandidat Mr. K Suebsang dari Thailand, dengan kandidat dari Pakistan mengundurkan diri setelah mempertimbangkan *track record* dari nominasi Thailand.
- Australia yang diwakili, Ms. Deborah O'Neill (menggantikan sementara Ketua DPR RI Australia, Mr. Milton Dick), menyampaikan sejumlah perkembangan hasil dari rapat Komite Eksekutif.
- Pada kesempatan pertimbangan rancangan item darurat (*emergency item*), Ketua BKSAP DPR RI menyampaikan Indonesia dan Malaysia bergandengan tangan mengajukan draf resolusi bertajuk *Parliamentary Diplomacy for Peace in Palestine*.

Ketua BKSAP berkeyakinan sebagai organisasi antar-parlemen global, IPU harus menyatakan pendapatnya mengenai apa yang terjadi di Gaza. Bencana di luar katastropi tersebut sangat nyata terlihat dan yang melihatnya akan berakhir dengan tangis kemarahan.

Tragedi sebesar itu memerlukan IPU untuk campur tangan, tidak hanya Komite untuk isu Timur Tengah. Kemanusiaan dalam ambang kepunahan. Ketua BKSAP DPR RI mendesak IPU perlu merespon kegawatan yang terjadi di Gaza secepat kita merespon konflik lainnya seperti konflik Russia-Ukraina.

Gambar 2.3 Ketua dan Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon dan Gilang Dhielafararez mewakili delegasi DPR RI dalam pertemuan Asia Pacific Group di sidang IPU ke-148



Resolusi tersebut diajukan dengan mempertimbangkan tema besar IPU pada pertemuan ke-148 yang akan membicarakan langkah-langkah diplomasi parlemen untuk menjembatani dialog perdamaian akan konflik-konflik global. Resolusi bertujuan untuk menegakkan hukum internasional, termasuk hukum humaniter internasional, sebagai prinsip pemandu utama dalam perilaku global sekaligus memajukan *good offices* dari IPU dalam mendorong perdamaian di Palestina seperti melakukan kunjungan ke perbatasan terdekat Gaza, yakni Rafah, Mesir.

Dengan IPU sebagai payung utama, misi tersebut akan sangat bermanfaat untuk komunitas parlemen global dalam melihat konflik terkait.

- Usulan tersebut mendapat respon positif dari anggota APG. Kanada dan Australia menyatakan kegagalan IPU 147 di Luanda, Angola, sangat disesalkan dan memiliki dampak yang signifikan bagi situasi yang terjadi saat ini. Delegasi Tiongkok mendukung agar situasi konflik di Gaza dapat berhenti dan dengan pertimbangan kemanusiaan gencatan senjata dapat terjadi. Respon serupa juga disampaikan oleh parlemen lainnya dan mendapatkan vote afirmasi dari seluruh peserta rapat APG. Dengan demikian, APG mendukung usulan *emergency item* yang diajukan DPR RI.
- Untuk mendukung proses *drafting* resolusi terkait, Delegasi Iran dan Pakistan mengajukan diri sebagai wakil APG dalam komite penyusunan resolusi darurat.

4. PARLIAMENTARY UNION OF THE OIC MEMBER STATES (PUIC) MEETING

Dalam pertemuan PUIC Group di sela-sela Sidang IPU ke-148, delegasi DPR RI yang hadir yaitu Dr. H. Sukamta menyampaikan intervensinya terkait posisi Indonesia dalam Sidang IPU ke-148 ini. Ia menyampaikan bahwa Indonesia, telah mengajukan usulan draf emergency item bertajuk *“Parliamentary Diplomacy for Peace in Palestine”* yang menekankan pada pentingnya peran parlemen IPU dalam mendorong terwujudnya perdamaian di Palestina. Selanjutnya, Dr. Sukamta berharap agar parlemen dunia yang hadir dalam IPU dapat bersatu dalam mendorong agar draf ini dapat diadopsi. Ia juga menyayangkan bahwa pada Sidang IPU ke-147 sebelumnya, tidak ada draf emergency item terkait Palestina yang diadopsi dan ini menunjukkan bahwa parlemen dunia tidak mampu merespon kekejaman Israel dan menerapkan standar ganda dalam mewujudkan perdamaian dunia dan keadilan internasional.

Terkait agresi Israel di Gaza, Dr. H. Sukamta menegaskan posisi Indonesia yang secara konsisten menolak berbagai tindakan okupansi ilegal yang dilakukan oleh Israel di Gaza, dan seluruh wilayah Palestina. Ia menambahkan bahwa PUIC Group harus mampu menunjukkan posisinya secara tegas dalam menyikapi tindakan brutal Israel ini. Dalam kesempatan ini, juga hadir Parlemen Afrika Selatan yang dalam Sidang IPU ke-148 ini juga mengajukan emergency item yang mendorong agar Israel menghormati proses peradilan internasional di ICJ dimana Israel harus menghentikan berbagai tindakan barbar dan tidak berperikemanusiaan yang dilakukan di Gaza.



Gambar 2.4 Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Sukamta selaku anggota *Committee Middle East Questions* mengajukan usulan draf emergency item bertajuk *“Parliamentary Diplomacy for Peace in Palestine”*

Dalam kesempatan ini, parlemen PUIC Group sepakat untuk mendukung Indonesia dan Afrika Selatan yang dalam IPU ke-148 ini mengajukan draf emergency item yang serupa mengenai seruan agar Israel menghentikan tindakan barbar dan keji dengan menargetkan masyarakat sipil, khususnya perempuan dan anak-anak di Palestina. Dr. H. Sukamta menegaskan bahwa dalam situasi krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di Gaza saat ini, parlemen dunia harus mampu bersuara dan tidak hanya tinggal diam.

5. WORKING GROUP FOR UNIFYING POSITION ON THE EMERGENCY ITEM

Hasil pertemuan parlemen negara anggota PUIC, menyepakati pembentukan kelompok kecil untuk menyatukan atau menggabungkan usulan resolusi dengan situasi serupa yakni Indonesia-Malaysia dengan *Parliamentary Diplomacy for Peace in Palestine* dan usulan dari Afrika Selatan dengan *Raising awareness of the ICJ provisional measures for Israel in relation to Palestinians in Gaza, and of the need for urgent action on the humanitarian crisis in Gaza*. **Aljazair dan Jordan, yang menyatakan akan mengajukan rancangan resolusi serupa (dokumen tidak tersedia termasuk rancangan resolusi-nya), juga bergabung.** Delegasi Palestina diminta untuk bergabung dalam berdiskusi.

Dalam pertemuan yang dihadiri Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Sukamta di Lantai -1, Salle 3, CICG itu, Sabtu (23/3), Delegasi Aljazair dan Jordan mengusulkan penggabungan dan perubahan judul. Sementara Delegasi Afrika Selatan menekankan resolusi yang diusung pihaknya disusun dengan mempertimbangkan narasi seimbang mungkin untuk menghindari penolakan dan kontra-aksi dari parlemen negara lainnya.

Delegasi Indonesia dan Malaysia menyepakati rancangan resolusi Afrika Selatan dapat menjadi *baseline* untuk penggabungan. Namun demikian, Dr. Sukamta menyoroti mengenai pentingnya melakukan strategi dalam meloloskan draf resolusi. Ia menyarankan untuk tidak melakukan penggabungan, penggabungan, dan lain sebagainya sebelum tenggat waktu pengajuan *emergency item* berakhir.



Gambar 2.4 Delegasi DPR RI sepakat untuk menggabungkan usulan draf resolusi *emergency item* yang diajukan oleh parlemen Afrika Selatan.

Hal ini dilakukan agar tidak ada delegasi parlemen lain yang mengajukan kontra narasi terkait draf resolusi dimaksud. Indonesia dan Malaysia akan tetap mengajukan rancangan resolusi dimaksud, namun, saat penyampaian *emergency item*, DPR RI akan menarik usulan resolusi, mendukung rancangan Parlemen Afrika Selatan, dan menggabungkan paragraf-paragraf yang menjadi aspirasi Indonesia dan Malaysia ke resolusi *emergency item* Afrika Selatan.

Seluruh peserta rapat menyepakati metode tersebut dan akan bekerja di level teknis dalam konteks penggabungan hal-hal yang krusial yang menjadi perhatian Indonesia dan Malaysia.

6. ASIAN PARLIAMENTARY ASSEMBLY (APA) MEETING

Pertemuan APA Meeting dalam Sidang IPU ke-148 dihadiri oleh Ketua BKSAP Dr. Fadli Zon yang menyampaikan intervensinya tentang posisi DPR RI terhadap agenda APA Meeting. Dalam pembukaannya, Dr. Fadli Zon menyampaikan bahwa Indonesia telah mengajukan draf *emergency item* berjudul *Parliamentary Diplomacy for Peace in Palestine* di Sidang IPU ke-148 ini. Melalui draf ini, Dr. Fadli menegaskan komitmen Indonesia yang menolak penjajahan di seluruh dunia, dan khususnya terkait okupansi Israel di Palestina, DPR RI menolak segala praktek penjajahan yang selama ini dilakukan Israel selama berpuluh-puluh tahun di tanah Palestina.



Gambar 2.5 Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon berdiskusi dengan anggota parlemen Mesir, Hon, Mr. Karim Darwish, dalam sidang IPU148 di Jenewa, Switzerland

Ia berharap agar parlemen APA dapat bersatu dalam menyuarakan dukungannya pada saat pelaksanaan voting terhadap *emergency item*. Ketua BKSAP juga menambahkan bahwa tindakan barbar yang dilakukan Israel kepada masyarakat sipil Palestina sungguh tidak beradab. Di tengah bulan Ramadhan yang seharusnya dihiasi dengan kebahagiaan dan suka cita, namun anak-anak di Gaza harus menerima kenyataan bahwa serangan biadab Israel tidak juga berhenti.

Untuk itu, Dr. Fadli menyerukan agar negara-negara yang selama ini masih mendukung Israel dan membangun hubungan diplomatik dengan Israel, untuk mempertimbangkan kembali sikap politiknya. Dalam hal ini, praktek standar ganda yang diterapkan negara-negara dunia harus dihentikan. Parlemen APA yang hadir dalam kesempatan ini menyampaikan dukungannya terhadap *emergency item* yang diusulkan Indonesia. Bertindak selaku pimpinan sidang yakni Ketua Parlemen Azerbaijan juga menyampaikan dukungannya kepada Indonesia yang mengajukan usulan *emergency item* tersebut.

7. FORUM OF WOMEN PARLIAMENTARIANS

Forum ini dihadiri oleh Ketua DPR-RI, Dr. (H.C) Puan Maharani didampingi oleh beberapa anggota BKSAP, Irine Yusiana Roba Putri, Agustina Wilujeng, dan Vanda Sarundajang. Isu yang diangkat pada forum ini adalah isu perdamaian untuk perempuan. Ketua DPR-RI menyampaikan bahwa tugas sebagai anggota parlemen adalah memastikan bahwa perempuan harus diikutsertakan dalam perundingan perdamaian. Setiap anggota parlemen perempuan harus bekerja

sama untuk mendorong kepemimpinan perempuan dalam mencapai perdamaian baik dalam skala nasional maupun internasional.

Gambar 2.6 Ketua DPR RI, Dr. (HC) Puan Maharani menyampaikan intervensinya dalam pertemuan *Forum of Women Parliamentarians* pada sidang IPU ke-148 di Jenewa



Perempuan dan anak-anak masih menjadi kelompok yang paling terdampak dan paling rentan di kala konflik dan perang... seperti yang terlihat jelas di Gaza dan Ukraina. Ketua DPR-RI menyatakan bahwa setengah dari populasi dunia adalah perempuan dan perempuan adalah bagian integral dari solusi perdamaian, sehingga perempuan bisa menjadi agen perdamaian yang efektif. Untuk itu Ketua DPR-RI menekankan bahwa anggota parlemen harus mendorong kepemimpinan perempuan dalam proses perdamaian.



Gambar 2.7 Dalam pidatonya, Ketua DPR RI, Dr. (HC) Puan Maharani menegaskan pentingnya peran dan kepemimpinan perempuan dalam proses perdamaian

8. GENERAL DEBATE

Perdebatan *emergency item* dilakukan pada Minggu (24/3), pada sesi *General Debate* di Ruang Assembly CICG pukul 17.00. Sedikitnya enam resolusi diajukan ke IPU, yakni:

1. *Raising awareness of the International Court of Justice Provisional Measures for Israel in Relation to Palestinians in Gaza, and of the Need for Urgent Action on the Humanitarian Crisis in Gaza* (Afrika Selatan mewakili Grup Afrika).
2. *The Immediate Release the Hostages in Gaza* (Israel).
3. *Parliamentary Diplomacy for Peace in Palestine* (Indonesia – Malaysia).
4. *Call for Urgent Action Regarding the Conflict in the Middle East* (Denmark dan Prancis mewakili *Twelve+ Group*).
5. *Free, Fair and Transparent Elections Without Prohibitions: Towards an Orderly and Peaceful Democratic Transition in the Bolivarian Republic of Venezuela* (Argentina, Guyana, Peru, Trinidad & Tobago, Uruguay).
6. *Call for Urgent Action to End the Aggression and Massive Violations of Human Rights in the DRC* (DRC).

Dalam perdebatan, *Twelve+ Group* mengklaim telah sepakat dengan Afrika Selatan mewakili Grup Afrika dan juga kelompok dari Grup Arab mengenai basis resolusi yang akan diusulkan menjadi satu dengan judul menggunakan resolusi dari Afrika Selatan. Klaim kesepatan tersebut berupa (i) gencatan senjata segera untuk melindungi masyarakat sipil kedua pihak; (ii) pelepasan segera para sandera; (iii) pengiriman bantuan kemanusiaan segera dan tanpa hambatan; (iv) penghormatan terhadap hukum internasional, antara lain ICJ dan Konvensi Jenewa.



Gambar 2.8
Pimpinan BKSAP
DPR RI pada sesi
General Debate
dalam sidang
IPU148 di
Jenewa,
Switzerland

Namun demikian, klaim tersebut diklarifikasi oleh Afrika Selatan dengan pernyataan akan terjadi kesepakatan apabila *Twelve+ Group* juga menyepakati pelepasan segera para sandera dan tahanan politik. Karena tidak ada kesepakatan, maka, Afrika Selatan kembali pada usulan dan teks resolusi semula yang mereka ajukan.

Kendati demikian, *Twelve+ Group* menyita durasi perhatian mengingat pihak yang mewakili diskusi dengan Afrika Selatan adalah Belgia (bukan pengusung *emergency item*), dan sempat berada di podium dengan dalih telah sepakat dengan Afrika Selatan akan satu rancangan resolusi. Sementara itu, Denmark, yang menjadi pengusung *emergency item* juga mendapatkan waktu di podium untuk menjelaskan *emergency item* yang diusung.

Durasi waktu yang cukup signifikan di atas podium yang dimiliki *Twelve+ Group* tersebut memecah konsentrasi dan perhatian para anggota IPU dalam proses penentuan dukungan (voting).

Persidangan juga berlangsung panas ketika Delegasi Israel berada di Podium untuk menjelaskan rancangan resolusi usulannya. **Delegasi Indonesia *walk out* dari General Debate dan diikuti oleh sedikitnya dua negara yakni Iran dan Aljazair.** Delegasi Israel juga mendapatkan protes dari sejumlah parlemen. Delegasi Irlandia juga memprotes Israel terkait klaim tidak ada langkah lain yang dapat dilakukan untuk membebaskan sandera.

Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon dalam penyampaian pandangan *emergency item* yang diusung Indonesia-Malaysia menerangkan hingga saat ini, IPU diam terhadap serangan dan bombardir Israel di Gaza. Sementara anggota IPU mengetahui serangan tersebut tidak proporsional, menelan korban jiwa tak terhitung, dan hukum internasional dan hukum humaniter internasional (IHL) diabaikan terus menerus.



Gambar 2.9 Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon menyampaikan pandangannya dalam usulan *Emergency Item*. Delegasi Republik Indonesia juga melakukan *Walk out* ketika delegasi Israel naik Podium

Yang terjadi pada pertemuan IPU ke-147 di Angola, ketika organisasi tersebut gagal menyatakan posisi umum yang bersatu akan situasi di Gaza terjadi bukan karena perpecahan. Tetapi karena kebisuan dan abai akan situasi yang terjadi karena politik internasional dan standar ganda. Hal ini mengganggu, terlebih ketika sebuah resolusi berjudul *Stopping the War*, ditolak.

IPU harus menyatakan pendapat akan apa yang terjadi di Gaza. Bencana melebihi katastrofi terjadi atas restu mereka yang memiliki kuasa di arena internasional. IPU juga telah melihat kalimat-kalimat ambigu untuk menangani situasi yang sudah memburuk tanpa kesadaran kemanusiaan akan akar masalahnya sejak awal.

Melihat perlunya kesatuan dan memperkuat rancangan resolusi terkait Gaza, Indonesia-Malaysia menyepakati untuk menarik rancangan resolusi, dan menggabungkan usulannya dengan usulan Afrika Selatan.

Saat voting Parlemen DRC dan Israel menarik usulan *emergency item* sehingga tersisa tiga resolusi (Afrika Selatan, Denmark dan Prancis, Argentina). Dua resolusi mendapatkan sorotan cukup signifikan yakni usulan dari Afrika Selatan dan usulan dari Denmark-Prancis.

Hasil voting yang tercatat sebagai berikut:

Resolusi	Parlemen pengusung	In favor (+)	Against (-)	abstain	2/3 total votes +/-	Hasil*
<i>Raising awareness of the International Court of Justice Provisional Measures for Israel in Relation to Palestinians in Gaza, and of the Need for Urgent Action on the Humanitarian Crisis in Gaza</i>	Afrika Selatan mewakili Grup Afrika dan Grup Arab	904	470	237	916 (dari total +/- 1374)	904 (tidak lolos)
<i>Call for Urgent Action Regarding the Conflict in the Middle East</i>	Denmark dan Prancis	778	471	362	833 (dari total +/- 1249)	778 (tidak lolos)
<i>Free, Fair and Transparent Elections Without Prohibitions: Towards an Orderly and Peaceful Democratic Transition in the Bolivarian Republic of Venezuela</i>	Argentina, Guyana, Peru, Trinidad & Tobago, Uruguay	225	760	626	657 (dari total +/- 985)	225 (tidak lolos)

*Untuk dapat menjadi resolusi suara yes (voting +) harus lebih besar dari dari total voting yes (+) dan no (-).
Catatan: Usulan resolusi dari Argentina juga tidak lolos.

Tidak lolosnya resolusi tentang situasi Gaza menambah catatan tidak bulatnya IPU untuk isu mendesak yang telah menyita perhatian dunia tersebut. Patut pula menjadi catatan adalah soliditas negara-negara yang tergabung dalam grup geopolitik seperti Afrika, yang menjadi pengusung resolusi diwakili Afrika Selatan, maupun grup geopolitik Asia. Beberapa parlemen Afrika memberikan suara yang tidak senada dengan usulan Afrika Selatan. Hal ini juga terlihat di Grup Asia, seperti Parlemen dari India, Kanada, bahkan Australia. Kanada dan Australia tercatat juga berada di grup lain yakni *Twelve+*.

9. STANDING COMMITTEE ON PEACE AND INTERNATIONAL SECURITY

Pada sidang ini, Ibu Ratih Megasari Singkarru selaku anggota komite menyampaikan intervensinya terkait konsekuensi kemanusiaan dari *Autonomous Weapon Systems and Artificial Intelligence* (sistem senjata otonom dan kecerdasan buatan). Kecerdasan Buatan akan mempunyai pengaruh besar terhadap masa depan keamanan internasional. Sebagai parlemen dan anggota parlemen hal ini menjadi tanggung jawab moral dan kewajiban inti, untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi apa pun, termasuk AI, tidak akan digunakan untuk merugikan orang-orang yang tidak bersalah. Oleh karena itu, prinsip-prinsip etika dan hukum di semua tahap harus diprioritaskan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ratih menekankan tiga hal penting dalam intervensinya; pertama, cara kerja senjata otonom harus diatur secara sah, adil, dan benar melalui instrumen yang mengikat secara hukum – bukan sekedar deklarasi politik dan dokumen tidak mengikat lainnya, dan aturan-aturan tersebut harus mengikat secara hukum untuk mendorong kepatuhan antar negara. Kedua, tidak boleh ada bias dan penerapan standar ganda dalam upaya memastikan penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk Hukum Humaniter Internasional dan instrumen terkait lainnya, untuk melindungi generasi sekarang dan masa depan dari konsekuensi penggunaan senjata otonom dan Kecerdasan Buatan. Dan ketiga, parlemen harus bertindak untuk mendorong dialog dan meningkatkan kerja sama dalam mengkaji dan mengatasi dampak teknologi baru terhadap peperangan, serta menemukan cara untuk memprioritaskan kemanusiaan dibandingkan kebutuhan militer.



Gambar 2.10 Anggota BKSAP DPR RI dan *Committee on Peace and International Security* IPU, Ratih Megasari Singkarru, hadir dalam pertemuan membahas *draft* resolusi terkait penggunaan sistem senjata otonom dan kecerdasan buatan

Lebih lanjut, terlepas dari upaya negara-negara untuk memodernisasi kemampuan militernya, tetap terdapat tantangan bahwa tidak ada instrumen spesifik dan mengikat secara hukum di tingkat internasional yang dapat melarang pengembangan, produksi, dan penggunaan sistem senjata otonom. Oleh karena itu, perlu penentuan posisi bersama untuk mengatur pengembangan dan penerapan mengenai senjata otonom dan kecerdasan buatan yang disetujui oleh semua negara. Dalam hal ini, DPR RI menyambut baik diskusi dan kerja sama dalam membentuk wacana mengenai dampak sosial dan kemanusiaan dari sistem senjata otonom dan kecerdasan buatan.

Adapun pengajuan revisi *draft* resolusi yang diajukan sebagai berikut:

1. Penambahan kalimat setelah paragraf 1 yang berbunyi:

Affirming that the principle of human responsibility and accountability for any use of lethal force must be preserved, regardless of the type of weapons systems involved,

Amandemen untuk menambahkan paragraf ini diusulkan untuk menyoroti konteks saat ini dimana terdapat perdebatan apakah tanggung jawab manusia, akuntabilitas, dan jenis sistem persenjataan diperhitungkan atau tidak ketika berdiskusi. Hal ini sebagai bentuk ketegasan posisi parlemen dalam menegaskan prinsip-prinsip tersebut terlepas dari kondisi yang disebutkan di atas.

2. Penambahan kalimat setelah paragraf pembuka 3 yang berbunyi:

Bearing in mind that despite the existing international law, particularly the Charter of the United Nations, International Humanitarian Law (IHL), and

international human rights law which applies to autonomous weapons systems; the world needs to urgently establish specific international rules and legally binding instruments on autonomous weapon systems to protect humanity,

Amandemen tersebut disarankan untuk memberikan pendirian yang jelas atas minimnya aturan-aturan internasional yang spesifik dan instrumen-instrumen yang mengikat secara hukum yang menjadi landasan hukum bagi sistem persenjataan otonom agar sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, yaitu melindungi rakyat.

3. Mengamandemen paragraf pembuka 6 sebagai berikut:

Mindful Fully aware that about the negative consequences and impacts of LAWS which have the potential to become future weapons of mass destruction as they combine two properties unique to such weapons: mass harm and lack of human control to ensure they do not injure civilians,

Usulan amandemen pada paragraf ini untuk menyoroti konsekuensi dan dampak negatif Sistem Senjata Otonom Mematikan yang terkadang bertentangan dengan prinsip etika dan hukum

4. Menghapus paragraf pembuka 16 sebagai berikut:

Mindful that many States and groups of countries have already been calling for the establishment of a binding instrument to regulate, limit and/or prohibit the use of LAWS,

Hal ini tidak terlalu penting untuk dimasukkan ke dalam rancangan resolusi karena hal ini merupakan sesuatu yang tidak perlu dikatakan lagi. Bukan berarti bahwa gagasan ini beretntangan, namun lebih disebabkan karena rancangan resolusi harus menyatakan sesuatu yang lebih kuat dari ini.

5. Mengamandemen paragraf pembuka 17 sebagai berikut:

Reaffirming Recognizing that urgent, concrete action is needed to develop an international, legally binding instrument, particularly given that autonomous systems have already been used in places such as Afghanistan, Azerbaijan and Ukraine, and the occupied Palestinian Territories at the expense of people's lives, and that the development and use of such systems will only increase with time,

Usulan amandemen dengan menyatakan Wilayah Pendudukan Palestina (*Occupied Palestinian Territory*) sebagai salah satu wilayah di mana sistem otonom digunakan oleh pihak-pihak yang berkonflik. Dengan tidak memasukkan *OPT*, maka akan terdapat standar ganda, yang disebabkan oleh terbaikannya risiko sistem otonom yang tentunya dapat membawa

dampak negatif terhadap warga sipil, khususnya mereka yang berada di Palestina saat ini.

6. Mengamandemen paragraf pembuka 19 sebagai berikut:

*Reaffirming the commitment to uphold the principles of predictability and proportionality set forth in IHL, as the black box of AI could hinder States' ability to comply with those principles, **therefore human control must be maintained over weapon systems and the use of force to satisfy legal and ethical requirements,***

Amandemen ini diusulkan untuk menyoroti dua hal: pertama, tentang perlunya penekanan pada kendali manusia atas sistem senjata, dan kedua, tentang pentingnya mempertimbangkan persyaratan hukum dan etika terkait Kecerdasan Buatan.

7. Menambahkan paragraf inti setelah paragraph inti 1 sebagai berikut:

Reaffirms parliaments and parliamentarians' commitments to maintain peace, international security, and stability: and to avoid all forms of double standards and bias in assessing the threats posed by LAWS and how the general rules must apply,

Usulan amandemen untuk menambahkan paragraf ini diajukan untuk menegaskan kembali komitmen parlemen dan anggota parlemen untuk menjaga keamanan internasional, khususnya dalam konteks *Legal Aspects of Autonomous Systems (LAWS)*.

8. Mengamandemen paragraf inti 3 sebagai berikut:

*Calls on parliaments to urge their governments to **conduct legal reviews of new weapons, means, and methods of warfare, and** negotiate a legally binding instrument with prohibitions and regulations about autonomy in weapons systems, to ensure compliance with international law, including IHL, and ethical perspectives, as well as the prevention of the peace and security impact that autonomy in weapons systems entail;*

Amandemen tersebut diusulkan untuk menyerukan tindakan mengingat fungsi parlemen untuk memastikan bahwa legalitas senjata, sarana, dan metode peperangan baru di masing-masing negara menghadapi tantangan saat ini dimana pengembangan senjata jenis baru semakin meningkat.

9. Mengamandemen paragraf inti 9 sebagai berikut:

*Urges parliaments to request that their governments **to uphold its clearly define their own responsibilities and be held accountable in accordance with international laws and related legal documents on autonomous weapon systems and Artificial Intelligence, and those of the private***

sector and civil society with regard to autonomous weapon systems, and adopt legislation to ensure that such systems do not fall into criminal hands or into the hands of non-State groups that operate outside the law;

Amandemen ini diusulkan mengingat fungsi parlemen untuk mengawasi posisi pemerintah apakah mereka bertanggung jawab atau tidak dalam hal sistem senjata otonom dan Kecerdasan Buatan, serta untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan hukum internasional dan dokumen hukum terkait – sehingga hal ini akan terwujud dan membawa kebaikan bagi Masyarakat tanpa kerugian.

10. Mengamandemen paragraf inti 11 sebagai berikut:

*Recommends that parliaments and parliamentarians allocate budgets to fund plans, programmes, projects and actions to raise awareness of the need to prevent, regulate, monitor and enforce human rights and safeguards related to LAWS, **including to mitigate risks of failures in AI capabilities;***

DPR RI mengusulkan amandemen ini karena tidak ada pernyataan dalam rancangan resolusi ini yang menyoroti secara spesifik komitmen parlemen dalam tata cara memitigasi potensi risiko dalam kemampuan Kecerdasan Buatan.



Gambar 2.11 Suasana pertemuan *Committee on Peace and International Security* pada sidang IPU ke-148 di Jenewa, Switzerland

10. STANDING COMMITTEE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Pertemuan Komisi Pembangunan Berkelanjutan IPU berlangsung pada Minggu (24/3) pukul 09.00 – 13.00, Senin (25/3), 14.30 – 18.30 dan Selasa (26/3) 17.00 – 18.30 di Plenary B&C, 0 Floor, CICG.

Ketua Komite, Hon. Mr. W Williams (Seychelles) memimpin rapat dengan dihadiri oleh Co-Rapporteurs: Ms. L Vasylenko (Ukraina), Ms. Meera Al Suwaidi (UAE). Sementara Rapporteur Mr. S Patra dari India berhalangan hadir. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana menghadiri pertemuan tersebut didampingi oleh Anggota BKSAP DPR RI, Andi Achmad Dara dan Melchias Markus Mekeng.

Para anggota komite membahas rancangan resolusi yang disusun co-rapporteurs bertajuk *Partnership for climate action: Promoting access to affordable green energy, and ensuring innovation, responsibility and equity*. Sebelum pembahasan rancangan resolusi, Komite Pembangunan Berkelanjutan mengundang sejumlah panelis untuk menyampaikan pandangan terkait isu perubahan iklim.



Gambar 2.12 Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana didampingi oleh Anggota BKSAP DPR RI, Andi Achmad Dara dan Melchias Markus Mekeng pada pertemuan *Committee on Sustainable Development* sidang IPU ke-148

Christine Adam, Director of Legal Affairs dari Sekretariat UN Framework Convention for Climate Change (UNFCCC) dan Hon. Mr. Soltan Teymur Oglu Mammadov (Azerbaijan) sebagai wakil dari tuan rumah Parliamentary Meeting at COP29 menjadi pembicara dalam sesi tersebut.

Christine Adam menyampaikan hasil-hasil COP28, termasuk hasil dari proses *Global Stock Taking (GST)* yakni proses inventarisasi isu-isu perubahan iklim. Salah satu kesepakatan penting dalam isu perubahan iklim adalah mewujudnya kesepakatan untuk transisi energi dari energi fosil secara bertahap, sebuah pernyataan yang sebelumnya belum pernah terjadi di COP.

Sementara Hon. Soltan Mammadov menerangkan COP29 merupakan keberlanjutan dari COP28 dan akan mendiskusikan isu-isu perubahan iklim, terutama soal pembiayaan iklim. Ia mengundang para anggota komite untuk menghadiri acara tersebut yang akan dihelat pada akhir tahun. Parliamentary Meeting COP29 akan menjadi platform rekomendasi kepada kesepakatan COP dan akan menggali lebih jauh pembahasan mengenai anggaran dan kesenjangan pembiayaan iklim serta langkah-langkah cerdas yang dimiliki parlemen.

Usai pemaparan, komite melanjutkan dengan penyusunan resolusi. Co-rapporteurs menjelaskan sedikitnya 27 parlemen menyampaikan masukan dengan lebih dari 100 masukan. Mengingat jumlah masukan yang relatif banyak, co-rapporteurs mengajukan pendekatan berbeda dengan mengusulkan teks resolusi baru dengan akomodasi dari usulan serupa, dan kemudian disepakati oleh para anggota komite.

Adapun beberapa hasil dari resolusi yang telah disepakati tersebut adalah:

1. Penekanan pada prinsip *common but differentiated responsibility* dan dengan mempertimbangkan situasi nasional masing-masing negara, dipertegas.
2. Penguatan pada upaya mengurangi gas metana global.
3. Penekanan pada tanggung jawab terbesar akan upaya perubahan iklim harus berada di negara maju (*developed countries*) mengingat kontribusinya pada emisi karbon dan rumah kaca.
4. Penegasan akan transisi energi yang berkeadilan khususnya untuk para pekerja yang terdampak dari transisi energi.
5. Imbauan agar parlemen aktif berkomitmen mengurangi emisi metana dengan masuknya rencana pengurangan emisi metana secara eksplisit di NDC, rancangan UU yang dapat mengurangi emisi metana dalam sektor energi dan manajemen limbah, mengalokasikan sumberdaya dan dana untuk riset, pengembangan teknologi dan pelaksanaan strategi pengurangan emisi metana.
6. Mendorong pemerintah masing-masing untuk berkontribusi dalam upaya perubahan iklim global dengan mempercepat teknologi bebas dan rendah emisi, termasuk terbarukan, nuklir, pengurangan dan pemindahan teknologi, dan produksi hidrogen rendah karbon.
7. Mendorong IPU untuk berinteraksi dengan pemangku kepentingan perubahan iklim, termasuk dalam arsitektur keuangan UNFCCC dan kerangka kerja teknologinya.





Gambar 2.13 Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana memberikan intervensinya selaku anggota komite dalam pertemuan *Committee on Sustainable Development* pada sidang IPU ke-148 di Jenewa, Switzerland

DPR RI mengajukan beberapa usulan yang dinilai penting untuk penekanan konteks resolusi dan disetujui oleh para anggota komite yakni:

1. Mempertegas prinsip *common but differentiated responsibility* dengan situasi nasional masing-masing yang diakomodasi dengan memasukkan Pasal 2.2 Perjanjian Paris.
2. Penegasan terminologi pengembangan dan transfer teknologi (*technology development and transfer*), mengingat dalam rancangan resolusi tersebut tidak ada kalimat tegas mengenai transfer teknologi.
3. Memperjelas fungsi lembaga legislatif dalam pemaparan peran parlemen dalam perubahan iklim dari hanya pengawasan kebijakan, menjadi legislasi hingga pengawasan.
4. Memberi rekomendasi satu paragraf full mengenai perlunya parlemen berinteraksi dengan seluruh pemangku kepentingan iklim termasuk arsitektur keuangan dan kerangka kerja teknologi UNFCCC.

Setelah rancangan resolusi disetujui, para peserta juga mendapatkan video singkat dari Presiden World Water Council Louis Fauchon. Wakil Ketua BKSAP, Putu Supadma Rudana menyambut penayangan video tersebut dengan menginformasikan rencana penyelenggaraan Parliamentary Meeting on the Occasion of the 10th World Water Forum, 19-22 Mei 2024 di Bali.

11. BUREAU OF THE STANDING COMMITTEE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT

Anggota Biro bertemu pada Selasa (26/3), 11.30 – 13.30. Salle Lausanne, CCV, Annex CICG. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana sebagai anggota Biro menghadiri rapat tersebut.

Rapat membahas dua usulan dari anggota IPU mengenai isu yang bakal diangkat oleh komite tersebut pada Assembly berikutnya. Adapun dua usulan dimaksud yakni: (i) *Towards a fair global financial system: The role of parliaments in preventing corporate tax avoidance and achieving sustainable development* (Australia), dan (ii) *the long-lasting impact of armed conflicts on sustainable development* (Swedia).



Gambar 2.14 Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana memberikan intervensinya selaku anggota komite dalam pertemuan tertutup *Bureau of Committee on Sustainable Development*. Telah disetujui isu yang diangkat yakni *Parliamentary strategies to mitigate the long-Lasting impact of conflicts, including armed conflicts, on sustainable development*

Setelah melakukan perdebatan dan sedikit perubahan judul usulan resolusi, anggota biro menyepakati secara voting, untuk membawa isu yang diajukan Swedia dengan rumusan judul baru sebagai berikut:

Parliamentary strategies to mitigate the long-Lasting impact of conflicts, including armed conflicts, on sustainable development.

12. STANDING COMMITTEE ON DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS

Pertemuan Komisi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM), berlangsung mulai Senin (25/3) di Plenary B&C, Level 0, CICG, pukul 09.30 – 12.30. Delegasi DPR RI diwakili oleh Andi Achmad Dara dan Melchias Markus Mekeng.

Fokus pertemuan adalah debat resolusi yang akan disusun pada IPU ke-149. Resolusi dimaksud berjudul *the impact of AI on democracy, human rights and the rule of law*.

Dalam debat beberapa negara menyoroti manfaat penggunaan AI, tetapi pada saat yang sama berhati-hati pada dampak negatifnya. Parlemen Kenya menyoroti potensi non-inklusif-nya penggunaan AI mengingat latar belakang Afrika yang mewariskan pengetahuan dan budaya secara lisan, tidak terekam tertulis. Data masyarakat adat yang tidak tertulis, dapat hilang begitu saja. Terlebih apabila pusat data yang ada juga tersebar tidak di Afrika. Pengetahuan akan etnis, bahasa, budaya berpotensi punah akibat data yang tak terekam itu.

Parlemen Afrika Selatan menekankan pentingnya pengawasan AI dan pembentukan panduan etis penggunaan AI secara jelas. Parlemen Jepang menekankan perlunya asesmen keamanan penggunaan AI dan untuk merujuk serta berkontribusi pada tata kelola AI secara internasional.



Gambar 2.15
Anggota BKSAP
DPR RI Andi
Achmad Dara dan
Melchias Markus
Mekeng mewakili
delegasi DPR RI
dalam pertemuan
*Standing
Committee on
Democracy and
Human Rights*.

Delegasi DPR RI yang diwakili Andi Achmad Dara menekankan empat hal yang dapat menjadi dasar penyusunan resolusi dimaksud. Hal-hal tersebut adalah: (i) perlunya mempertimbangkan dan merujuk pada norma dan respon multilateral terkait penggunaan AI seperti Rekomendasi Etik AI dari UNESCO maupun Prinsip-Prinsip OECD untuk AI; (ii) resolusi perlu mempertimbangkan perkembangan AI di seluruh sektor termasuk di militer, khususnya dalam pengoperasionalisasian *lethal and autonomous weapons systems* (LAWS); (iii) resolusi perlu menyoroti gap legislasi dan kebijakan terutama dalam hal etika

penggunaan AI; dan, (iv) resolusi harus secara komprehensif mempertimbangkan kepatuhan penuh pada aspek etika dan HAM dalam setiap tahapan siklus AI, sekaligus mendorong kolaborasi internasional dan multipemangku kepentingan untuk tata kelola-nya.



Gambar 2.16 Anggota BKSAP DPR RI Andi Achmad Dara menekankan pentingnya peran serta parlemen dalam meregulasi penggunaan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence (AI)* dalam berbagai sektor



13. BUREAU OF THE STANDING COMMITTEE ON DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS

Anggota Biro bertemu pada Minggu (24/3), pukul 11.30 – 13.30 waktu setempat di ruangan Salle Lausanne, CCV, Annex CIGG. Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Gilang Dhielafararez sebagai anggota Biro menghadiri rapat tersebut.

Diskusi singkat tentang resolusi *“The impact of artificial intelligence on democracy, human rights, and the rule of law,”* yang akan menjadi subyek debat komite dilakukan. Gilang Dhielafararez juga menyampaikan upaya yang dilakukan Indonesia dalam menjamin HAM terpenuhi, khususnya saat Pemilu, melalui pemilihan ulang, ketika masyarakat terdampak oleh bencana banjir seperti di Demak.



Gambar 2.17 Wakil Ketua BKSAP DPR RI dan Anggota Komite Demokrasi dan HAM IPU, Gilang Dhielafararez, menghadiri pertemuan *Bureau of the Standing Committee on Democracy and Human Rights*.

14. MIDDLE EAST QUESTION COMMITTEE

Pertemuan Komite Isu Timur Tengah berlangsung di S4, Lantai -1, CIGG, Geneva, pada Minggu (24/3), pukul 14.30. Anggota Komite Isu Timur Tengah dari Indonesia sekaligus Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Sukamta, menghadiri pertemuan tersebut.

Pertemuan menyepakati Presiden Komite baru, yakni Hon. Mr. H.J. Talsma yang merupakan anggota parlemen dari Belanda.

Pertemuan juga membahas urgensi kunjungan ke Palestina dan Israel dengan ancap-ancap jadwal dari Knesset Israel adalah Juli 2024. Sebagian besar anggota Komite Isu Timur Tengah berargumen kunjungan harus dilakukan secepatnya, mengingat kegentingan luar biasa yang terjadi di Gaza.



Gambar 2.18 Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Sukamta yang juga menjabat selaku anggota komite Timur Tengah IPU mengusulkan kunjungan komite ke Palestina dan Israel untuk melihat secara langsung dampak konflik yang terjadi pasca 7 Oktober 2023

Dr. Sukamta mengusulkan kunjungan juga dapat menggandeng otoritas internasional seperti PBB. Masukan tersebut diterima sebagai saran dan dapat menjadi pertimbangan lanjutan.

Pada pertemuan lanjutan Selasa (26/3) pukul 09.00, Komite Isu Timur Tengah menyepakati kunjungan akan dilakukan secepatnya dengan catatan Sekretariat IPU membutuhkan waktu persiapan sekitar sebulan termasuk untuk berkonsultasi terkait keamanan kunjungan ke Gaza. Komite Isu Timur Tengah juga akan menyampaikan laporan yang akan menggarisbawahi hal-hal yang menjadi kesepakatan internasional pascaresolusi Dewan Keamanan PBB 2728 (2024) yang disahkan Senin (25/3



Gambar 2.19 Hon. Mr. Hendrik-Jan Talsma (Tengah) yang merupakan anggota Parlemen Belanda terpilih menjadi Ketua Komite Timur Tengah IPU. Beliau memegang mandat ini sampai dengan bulan Maret

15. IPU TASK FORCE MEETING ON UKRAINE AND RUSSIA PEACEFUL RESOLUTION

Pertemuan Task Force on Ukraine berlangsung di Salle Geneve, CCV – Annexe Building, CICG, pukul 14.30 Senin (25/3). Pertemuan dihadiri anggota Task Force yakni President Task Force, Hon. Ali A Nuaimi (UAE); Ketua BKSAP DPR RI, Hon. Dr. Fadli Zon; Ketua Parlemen Namibia, H.E. Prof. Peter Katjavivi; dan President Senat Belgia, H.E. Ms Stephanie D'Hose.

Pertemuan juga sempat dihadiri oleh Presiden IPU, H.E. Ms. Tulia Ackson. Dalam sambutan singkatnya, Tulia menyampaikan dukungannya untuk kerja-kerja Task Force. Presiden IPU juga menginformasikan hasil keputusan Komite Eksekutif untuk melanjutkan mandat Task Force dalam menjadi jembatan dialog kedua parlemen. Jika diperlukan, Presiden IPU dapat pula menjangkau pemerintahan kedua negara untuk upaya mediasi terkait.

President Task Force menginformasikan Task Force mendapatkan apresiasi dari Sekretaris Jenderal PBB mengingat hingga saat ini satu-satunya yang masih berhubungan dengan Rusia adalah Task Force IPU. Sementara dalam hal kerja IPU, Sekretariat menyampaikan agar anggota Task Force dapat lebih sedikit spesifik dan menggunakan pendekatan bertahap dalam membangun dialog, mengingat hingga saat ini Task Force masih menerima penyampaian posisi nasional masing-masing saja.



Gambar 2.20 Para Anggota Gugus Tugas IPU dalam Penyelesaian Konflik Ukraina-Russia pada sidang IPU ke-148

Pakar yang hadir pada kesempatan tersebut menyampaikan perlunya Task Force membangun *confidence building* sebagai upaya menjembatani perbedaan. Langkah tersebut sudah mulai terwujud ketika kedua parlemen mulai melihat kepada isu spesifik yakni anak-anak, sebagai satu dari lima poin prioritas pemantauan Task Force.

Ketua BKSAP DPR RI, Hon. Dr Fadli Zon menekankan perlunya Task Force untuk juga menggali informasi tentang empat prioritas yang telah disepakati sebelumnya, sehingga tidak hanya berfokus pada isu anak.

Saat **hearing dengan Delegasi Parlemen Ukraina**, Task Force menggali peluang yang dapat dilakukan untuk menjadi jembatan perdamaian. Task Force berencana untuk dapat mencari peluang dalam Peace Summit yang akan dihelat Swiss dalam waktu yang belum ditentukan. Task Force juga akan mencari peluang untuk bertemu dengan Delegasi Parlemen Ukraina dan Rusia pada kesempatan lain di luar IPU Assembly untuk waktu dialog dan diskusi yang lebih lama.

Delegasi Parlemen Ukraina menilai apabila IPU dapat melakukan hal tersebut, mereka akan mendukungnya. Termasuk apabila Task Force kembali mengunjungi Kyiev bersama Presiden IPU. Task Force juga diminta untuk menanyakan kepada Rusia mengenai maksud perbatasan terkait kawasan historis. Mereka berpendapat masalah berada di Rusia yang menarik garis batas negara berdasarkan posisi yang abstrak.

Ketua BKSAP DPR RI, Hon. Dr. Fadli Zon juga menggali informasi mengenai proses repatriasi anak antarbatas, apakah Parlemen Ukraina telah memiliki legislasi untuk parameter tersebut dan kemungkinan Task Force berperan sebagai fasilitator parameter itu. Delegasi Parlemen Ukraina mengungkapkan tidak memerlukan aturan khusus dari parlemen karena mereka telah memiliki kantor Ombudsman untuk anak-anak. Ia mengusulkan IPU untuk dapat menulis sebuah kajian mengenai pengembalian anak-anak di masa perang.

Parlemen Ukraina juga mencoba memberikan nilai umum terkait apa yang dapat dimediasi, yakni terkait Piagam PBB dan Hukum Internasional, dan yang paling penting, penarikan militer Rusia dari wilayah Ukraina.

Ketika **hearing dengan Delegasi Parlemen Rusia**, Task Force mendapat kritik akan klaim progress, mengingat Parlemen Rusia tidak mendapatkan hasil apa-apa dan tidak mendengar apapun yang dibicarakan Task Force dengan Parlemen Ukraina. Parlemen Rusia kembali menegaskan sepakat dengan isu anak-anak dan bagaimana dapat menjamin keamanan mereka.

Parlemen saat ini tengah menginvestigas kejahatan terhadap anak-anak yang dilakukan Ukraina. Laporan investigasi tersebut ditargetkan selesai Juni 2024. Parlemen Rusia berargumen negara mereka tidak menculik anak-anak, tetapi melindunginya, mengingat tidak ada orangtua yang menjadi pelindung. Terkait kewarganegaraan, Parlemen Rusia menyampaikan tidak ada paksaan soal alih kewarganegaraan. Mereka dapat berpindah kewarganegaraan Rusia secara cepat apabila menginginkan demikian, tetapi, tidak ada paksaan.



Parlemen Rusia juga mengungkapkan selalu bekerjasama dengan entitas Ukraina untuk pengembalian anak-anak, namun, Ukraina tidak pernah mengekspos hal tersebut. Parlemen Rusia berkomitmen bekerjasama apabila Ukraina memiliki data dan daftar nama anak yang perlu dikembalikan. Mereka berjanji akan kooperatif.



Gambar 2.21 Delegasi parlemen Rusia memaparkan pendapatnya atas kinerja *IPU Task Force on Ukraine-Russian Peaceful Resolution* selama ini

Ketua BKSAP Hon. Dr Fadli Zon mengangkat pertanyaan mengenai kondisi yang seperti apa yang diperlukan Rusia untuk perdamaian. Parlemen Rusia menyatakan Ukraina melanggar Perjanjian Minsk dan tidak ada yang merespon. Sementara Rusia selalu mencoba mematuhi Perjanjian Minsk. Parlemen Rusia berpendapat perdamaian akhir adalah penting, begitupula dengan isu keamanan, juga menjadi hal yang penting. Mereka juga menegaskan, segala proses perdamaian termasuk Peace Summit atas prakarsa Swiss tidak akan efektif apabila tanpa kehadiran Rusia.



Gambar 2.22 Ketua BKSAP DPR RI yang juga merupakan anggota *Task Force*, Dr. Fadli Zon, mengangkat isu repatriasi lintas batas bagi anak-anak yang terdampak perang Ukraina-Rusia

Parlemen Rusia juga mengungkapkan, Ukraina telah menutup diri untuk dialog dengan Rusia. Parlemen Rusia juga berargumen hal ini terjadi karena peran negara-negara barat, sementara di sisi lain negara barat mengatakan Putin dapat mengakhiri konflik dalam sehari.

Task Force menyampaikan keinginan untuk menghelat pertemuan di luar jadwal Assembly dan juga rencana kunjungan kedua baik ke Kyiev dan Moskow melibatkan Presiden IPU. Parlemen Rusia menyambut baik rencana pertemuan di luar jadwal Assembly sembari mengingatkan anggota parlemen Rusia mendapatkan sanksi barat. Mereka menyarankan pertemuan digelar di kawasan netral dan tidak dalam situasi memberi sanksi ke Rusia. Parlemen Rusia juga menyambut baik rencana kunjungan kedua Task Force ke Moskow.

16. IPU SPECIAL ACCOUNTABILITY SEGMENT

IPU special Accountability segment adalah sesi dimana anggota parlemen dapat menyampaikan 3 menit intervensi terkait dengan *best practices* dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh parlemen negara masing-masing yang berhubungan dengan beberapa resolusi yang telah diadopsi oleh IPU pada sidang IPU Assembly sebelumnya, dengan menggarisbawahi beberapa isu yaitu solidaritas antar anggota parlemen dalam mendukung masyarakat yang inklusif dan aksi-aksi yang dilakukan parlemen untuk menanggulangi perubahan iklim.

Pada sesi ini, Putu Supadma Rudana, mewakili delegasi Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Dewan Pengurus yang memberikan segmen akuntabilitas khusus ini. Komitmen Indonesia terhadap resolusi IPU sangat tegas dan dibuktikan menindaklanjuti deklarasi dan resolusi terkait sejumlah isu. Adapun dua topik utama yang disampaikan oleh Putu terkait *best practices* dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh DPR RI yang berkaitan dengan beberapa resolusi yang telah diadopsi oleh IPU pada sidang IPU Assembly sebelumnya.

Pertama, terkait dengan tindakan parlemen dalam mengatasi perubahan iklim, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berkomitmen untuk mendukung transisi ekonomi hijau termasuk transisi energi. DPR RI terus memprioritaskan penyelesaian RUU Energi Baru dan Terbarukan, menghapuskan subsidi bahan bakar fosil, menerapkan skema pasar karbon, dan berupaya mencapai Penurunan Bersih Kehutanan dan Penggunaan Lahan Lainnya (*Forestry and Other Land Use/ FOLU Net Sink*) 2030.



Gambar 2.23 Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana menghadiri *IPU Special Accountability Segment*.

Selain itu, saat ini DPR RI sedang dalam pembahasan RUU tentang Pengelolaan Perubahan Iklim sebagai landasan hukum bagi upaya nasional dalam menjawab tantangan perubahan iklim agar bersifat komprehensif, sistematis, dan terintegrasi. Harapannya RUU ini dapat menetapkan pendekatan terpadu dalam upaya nasional dan provinsi melalui fungsi penganggaran dan pengawasan.

Lebih lanjut lagi, amandemen Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya juga sedang dibahas. RUU ini menekankan pada pelestarian keanekaragaman tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya; melindungi kawasan pelestarian alam; dan partisipasi masyarakat dalam upaya melindungi ekosistem.

Kedua, terkait dengan komitmen pelaksanaan Komunique Marakesh dalam mendorong upaya kolektif untuk mendorong inklusivitas dan hidup berdampingan secara damai serta menjunjung tinggi supremasi hukum, DPR RI meyakini bahwa keberagaman bukanlah sumber konflik. sebaliknya, ini adalah anugerah dari Tuhan yang dapat memperkuat solidaritas kita untuk mencapai perdamaian dan masyarakat yang lebih baik. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi prinsip “Bhinneka Tunggal Ika” Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia selalu berupaya mengedepankan saling pengertian, dialog, dan penghormatan terhadap keberagaman di tengah masyarakat.

Saat ini, DPR RI sedang membahas RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Tokoh Keagamaan sebagai bagian dari komitmen untuk memastikan bahwa semua tokoh agama dan tokoh agama yang agamanya diakui secara resmi oleh negara, diperlakukan dan dihormati secara setara. Sangat disayangkan bahwa saat ini, intoleransi, kebencian, dan xenophobia mengalami peningkatan dan telah membawa dampak negatif terhadap solidaritas global dan toleransi antar umat beragama. Oleh karena itu, Indonesia berharap melalui RUU ini dapat menunjukkan kepada dunia, bahwa meskipun Indonesia memiliki penduduk yang heterogeny dan berbeda-beda, namun bisa tetap menjunjung tinggi rasa hormat terhadap satu sama lain, serta berkomitmen pada toleransi, perdamaian, dan solidaritas.

Gambar 2.24 Dalam sesi ini anggota parlemen dapat menyampaikan 3 menit intervensi terkait dengan *best practices* yang telah diadopsi



Sebagai penutup, Putu juga menegaskan kembali komitmen DPR RI untuk berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang inklusif, damai, dan berketahanan, sekaligus menjunjung tinggi rasa hormat terhadap keberagaman demi menjaga persatuan dan harmoni.

17. IPU PANEL ON GENDER EQUALITY IN POLITICS

Sesi ini adalah sesi khusus merupakan diskusi aktif mengenai kesetaraan gender dalam politik, dan dihadiri oleh Ratih Megasari Singkarru dan Ema Umiyyatul Chusnah sebagai perwakilan delegasi Indonesia. Pada sesi ini, Ratih Singkarru menegaskan pentingnya untuk mengakui bahwa setiap orang mempunyai peran dalam mendorong kesetaraan gender, meskipun terdapat banyak tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, dialog yang sedang berlangsung mengenai gender dalam partisipasi politik menggarisbawahi pentingnya upaya kolektif dalam memajukan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan di semua bidang kehidupan.

Pada tahun 2024 yang dikenal sebagai tahun demokrasi, lebih dari 70 negara akan menyelenggarakan pemilihan umum, dengan sekitar 50% populasi global berpartisipasi dalam proses pemilihan untuk memilih pejabat publik. Pemilu kali ini mempunyai arti penting karena akan membentuk jalur demokrasi di masing-masing negara. Dengan keterwakilan perempuan yang lebih besar, Ratih Megasari Singkarru memaparkan hal ini dapat mengantisipasi proses pengambilan keputusan yang lebih inklusif, sehingga memastikan bahwa suara individu dari berbagai latar belakang dapat terdengar lebih jelas. Kehadiran perempuan di parlemen dapat menjadi katalis peningkatan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, parlemen siap untuk menjadi lebih peka dan tanggap terhadap berbagai permasalahan publik.

Lebih lanjut lagi, Ratih juga memaparkan upaya-upaya yang telah dan terus dilakukan oleh DPR RI dalam mendorong keterwakilan Perempuan. Salah satu upaya Indonesia untuk meningkatkan peran perempuan, khususnya di bidang

politik, telah dilakukan dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin peningkatan keterwakilan perempuan di kursi parlemen sebesar 30 persen. Aturan ini dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



Gambar 2.25
Anggota BKSAP
DPR RI, Ratih
Megasari Singkarru
dan Ema
Ummiyatul
Chusnah mewakili
DPR RI dalam
pertemuan IPU
Panel on Gender
Equality in Politics

Pasca pemilu tahun 2019, persentase perempuan di DPR RI mengalami peningkatan. Sebanyak 118 kursi atau 21 persen dari total 575 kursi DPR diisi oleh perempuan. Jumlah tersebut meningkat 22 persen dari pemilu sebelumnya yang hanya memperoleh 97 kursi. Pada periode legislatif ini, Indonesia mencapai tonggak sejarah yang signifikan dengan terpilihnya Ketua Parlemen perempuan pertama.

Indonesia menunjukkan komitmen terhadap kesetaraan gender dengan ditunjuknya beberapa menteri perempuan di kabinet pemerintah, yang memegang jabatan penting seperti Urusan Luar Negeri, Keuangan, Ketenagakerjaan, Sosial, dan Kehutanan. Selain itu, di sektor legislatif, kita telah melihat peningkatan keterwakilan perempuan, termasuk Wakil Ketua MPR, serta sejumlah bupati perempuan yang terpilih dalam lima tahun terakhir. Perkembangan ini mencerminkan dedikasi Indonesia dalam mendorong keberagaman dan inklusivitas gender di berbagai tingkat pemerintahan.

DPR RI juga memiliki Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas politisi perempuan, sehingga jalan bagi perempuan untuk menduduki posisi-posisi kunci lebih terbuka. Melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran parlemen, saya optimis Kaukus ini dapat mendorong kesetaraan gender, sehingga inklusi perempuan dalam proses pembangunan tidak hanya sekedar kebijakan afirmatif namun dapat menjadi wujud penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

Bersama Pemerintah, DPR RI juga telah menghasilkan berbagai undang-undang yang berperspektif gender, antara lain UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Melalui fungsi penganggaran, DPR RI giat menerapkan gender budgeting dalam setiap pembahasan APBN bersama Pemerintah.

Di tingkat regional, Indonesia telah memimpin upaya melalui Majelis Antar Parlemen ASEAN (AIPA) untuk meningkatkan ketahanan regional melalui inisiatif parlemen yang responsif gender.

DPR RI telah aktif terlibat dalam upaya peningkatan kesadaran untuk mendorong kesetaraan gender, termasuk kampanye dan lokakarya advokasi. Khususnya, pada tahun 2023, DPR bekerja sama dengan IPU menyelenggarakan lokakarya peningkatan kapasitas yang berfokus pada advokasi dan komunikasi untuk mendorong partisipasi yang lebih besar dalam politik. Inisiatif-inisiatif tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam proses politik.

Gambar 2.26 Dalam sesi ini Ratih Megasari Singkarru memaparkan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas politisi perempuan



Dalam kesimpulannya, Ratih kembali menegaskan keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan memberikan peluang bagi perempuan untuk diakui atas pencapaian mereka terlepas dari perbedaan kebangsaan, etnis, bahasa, nilai-nilai budaya, atau keyakinan agama dan atas kontribusi besar mereka terhadap pertumbuhan ekonomi global, pembangunan sosial, dan stabilitas politik. Dengan melibatkan dan mendukung perempuan, serta organisasi dan jaringan yang mewakili mereka, terutama dalam proses pengambilan keputusan, hal ini pada akhirnya akan membentuk masa depan yang lebih baik, dan yang terpenting adalah peka akan kesetaraan gender.

C. PARTISIPASI DELEGASI DALAM PERTEMUAN BILATERAL

Selama Sidang Umum IPU ke-148, Delegasi DPR RI juga melakukan pertemuan bilateral dengan beberapa parlemen.

1. PERTEMUAN BILATERAL DENGAN PARLEMEN VIETNAM

Hubungan diplomatik Indonesia dan Vietnam yang telah terjalin selama 70 tahun menunjukkan komitmen kedua negara dalam menjaga hubungan persahabatan yang berdasarkan pada prinsip saling menghormati. Di sela-sela persidangan Inter-Parliamentary Assembly (IPU) Assembly ke-148 yang berlangsung di Jenewa, Swiss pada 23-28 Maret 2024, delegasi DPR RI melaksanakan pertemuan bilateral dengan Parlemen Vietnam membahas berbagai isu strategis yang menjadi perhatian bersama, baik dalam bidang ekonomi, investasi, perdamaian dan keamanan, dan kerjasama kedua parlemen dalam berbagai forum parlemen.



Gambar 3.0 Suasana pertemuan bilateral antara delegasi BKSAP DPR RI dengan delegasi dari parlemen Vietnam

Dalam pertemuan ini, Ketua BKSAP (Badan Kerja Sama Antar Parlemen) DPR RI Dr. Fadli Zon menegaskan bahwa DPR RI mengapresiasi hubungan bilateral yang terjalin dengan parlemen Vietnam dan berharap agar dapat terus ditingkatkan. Perwakilan Parlemen Vietnam yang dipimpin oleh Wakil

Ketua Parlemen Vietnam, Hon. Mr. Tran Quang Phuong dalam kesempatan ini mengapresiasi kepemimpinan DPR RI dalam berbagai forum parlemen yang telah berlangsung sebelumnya, seperti P20 dan AIPA. Ia berharap dapat terus bekerjasama dengan DPR RI dalam meningkatkan hubungan bilateral kedua negara.



Gambar 3.1 Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon bersama dengan anggota Parlemen Vietnam, Hon. Mr. Phong Don Tuan

Terkait kerjasama di bidang investasi dan perdagangan, kedua parlemen sepakat untuk mendorong peningkatan perdagangan bilateral, melalui berbagai komoditas ekspor dan impor, termasuk salah satunya yaitu upaya untuk membangun industri halal. Di samping itu, juga dibahas upaya peningkatan kerjasama dalam bidang maritim dan perikanan. Sebagai salah satu negara tetangga yang saling berbatasan daerah laut, Indonesia dan Vietnam sepakat untuk menghormati batas ZEE dan mendukung penuh kedaulatan satu sama lain, khususnya dalam konteks perbatasan maritim kedua negara.

2. PERTEMUAN BILATERAL DENGAN PARLEMEN MYANMAR (COMMITTEE REPRESENTING PYIDAUNGSU HLUTTAW / CRPH)

Delegasi DPR RI melakukan pertemuan dengan wakil dari *Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw* (CRPH) Myanmar, anggota parlemen pengasingan yang dipimpin oleh Union Minister for Humanitarian Assistance and Disaster Management, CRPH Myanmar, Hon. Dr. Win Myat Aye, pada Minggu (24/3), di Salle Vevev, CCV, Annex, CICG.

Delegasi DPR RI diwakili oleh Ketua BKSAP DPR RI, Dr Fadli Zon; Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Sukamta; dan Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana.



Gambar 3.2
Delegasi dari
*Committee
Representing
Pyidaungsu
Hluttaw
(CRPH)*
Myanmar dalam
pertemuan
bilateral

Dalam pertemuan tersebut, CRPH menyampaikan perkembangan terkini mengenai situasi perlawanan di Myanmar. Tiga tahun pasca kudeta, gerakan perlawanan mengalami perkembangan signifikan. Junta Myanmar banyak yang mundur karena kalah dengan kelompok etnis bersenjata dan dukungan untuk revolusi semakin kuat. Ia menggarisbawahi saat ini seluruh kelompok etnis bersenjata yang melakukan perlawanan telah bersatu.

Kendati demikian, saat ini Junta memberlakukan *conscription* atau wajib militer. Ini berarti generasi muda Myanmar terancam dan banyak yang kabur atau hilang secara paksa. Ini juga terjadi pada kaum etnis Rohingya, yang saat ini banyak dipaksa masuk militer.



Gambar 3.3 Delegasi CRPH mengungkapkan *Five Point Consensus (5PC)* yang tidak berkembang secara signifikan; termasuk dalam hal pengiriman bantuan kemanusiaan

Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon, menyampaikan DPR RI sebagai anggota AIPA selalu peduli dengan isu Myanmar, jauh sebelum kudeta. DPR RI ingin mengetahui kontribusi apa yang diperlukan untuk mendukung Myanmar melalui AIPA dan juga perkembangan *Five Point Consensus* (5PC) sejauh ini.

Delegasi Myanmar mengungkapkan realita 5PC yang tidak berkembang. Termasuk dalam hal pengiriman bantuan kemanusiaan. Oleh karenanya, CRPH mengusulkan alternatif penyaluran bantuan kemanusiaan, tidak hanya melalui AHA Center tetapi juga kepada International NGO yang ditunjuk. CRPH kemudian menyampaikan usulan tertulis dimaksud kepada Delegasi DPR RI.

3. PERTEMUAN BILATERAL DENGAN PARLEMEN SWEDIA

Dalam pertemuan bilateral dengan Parlemen Swedia, DPR RI Sepakat Pentingnya Penghormatan Terhadap Keberagaman dan Toleransi sebagai Upaya Wujudkan Perdamaian

Keberagaman adalah suatu keniscayaan. Sebagai negara yang terdiri dari beragam suku, agama, ras, dan etnis, Indonesia menjunjung tinggi prinsip penghormatan terhadap keberagaman sebagaimana tertera dalam Pancasila yang menjadi landasan bangsa Indonesia dalam ikhtiar mewujudkan keadilan sosial dan perdamaian.

Hal ini disampaikan oleh Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon dalam pertemuan bilateral dengan Parlemen Swedia yang diwakili oleh Wakil Ketua Parlemen Swedia Kerstin Lundgren, didampingi anggota parlemen Swedia yakni Margareta Cederfelt dan Serkan Kose di sela-sela sidang parlemen dunia bertajuk the 148th Inter-Parliamentary Assembly (IPU) Assembly yang berlangsung di Jenewa, Swiss pada 23-28 Maret 2024.

Dr. Fadli Zon mengungkapkan bahwa Indonesia sangat menyesalkan dan mengutuk berbagai teror dan tindakan yang didasari atas kebencian terhadap suatu agama tertentu, sebagaimana fenomena Islamophobia yang terjadi di beberapa negara di Eropa akhir-akhir ini, seperti pembakaran kitab suci Al-Qur'an, dan penghinaan terhadap Nabi Muhammad. Hal ini jelas-jelas mencederai nilai kemanusiaan dan memperkeruh upaya mewujudkan perdamaian dunia melalui toleransi antarumat beragama.



Menanggapi hal ini, Parlemen Swedia menyatakan pula kecamannya terhadap berbagai tindakan yang mengatasnamakan identitas tertentu dan melakukan penghinaan terhadap agama maupun simbol dan identitas agama. Wakil Ketua Parlemen Swedia Lundgren menyatakan komitmen Swedia sebagai negara yang menjunjung tinggi keberagaman dan penghormatan terhadap umat beragama.



Gambar 3.4
Pertemuan
Bilateral
delegasi BKSAP
DPR RI dengan
anggota
Parlemen

Di tengah dunia yang sedang tidak baik-baik saja, diperlukan upaya kolektif untuk mewujudkan perdamaian, salah satunya yakni dengan menjunjung tinggi penghormatan terhadap keberagaman dan mengedepankan dialog dalam mengatasi berbagai konflik.



Gambar 3.5 Parlemen Indonesia dan Swedia berkomitmen untuk menjunjung tinggi keberagaman dan penghormatan terhadap umat beragama

Dalam kesempatan ini, DPR RI juga menyampaikan kembali komitmen Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina serta menentang berbagai tindakan barbar Israel baik berupa okupansi yang berlangsung berpuluh-puluh tahun, maupun berbagai serangan yang telah menewaskan ribuan masyarakat sipil tak berdosa di Palestina, yang mayoritasnya adalah perempuan dan anak-anak. Sebagai negara Uni Eropa yang pertama kali menyatakan dukungannya terhadap Palestina sebagai sebuah negara, Swedia mendorong terwujudnya solusi dua negara atau *two state solution* untuk mengakhiri konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina.

4. PERTEMUAN BILATERAL DENGAN PARLEMEN KERAJAAN INGGRIS

Hubungan bilateral Indonesia dan Inggris yang berjalan sejak tahun 1949 telah mencakup berbagai bidang dan sektor strategis antara lain perdagangan, ekonomi, investasi, pendidikan, penguatan demokrasi, politik, dan pertahanan. Di tengah kondisi geopolitik di kawasan maupun global yang terus dinamis, Inggris berkomitmen untuk memperkuat kerjasama bilateral dengan Indonesia sebagai salah satu mitra strategisnya di lingkup ASEAN.

Dalam rangka memperkuat jembatan diplomasi parlemen, Parlemen Inggris mengajak DPR RI untuk melakukan pertemuan bilateral di sela-sela sidang Inter-Parliamentary Assembly (IPU) Assembly ke-148 yang berlangsung di Jenewa, Swiss pada 23-28 Maret 2024. Pada kesempatan ini, Parlemen Inggris yang dipimpin oleh Hon. Mrs. Dame Karen Bradley dan dihadiri oleh 5 anggota parlemen Inggris lainnya antara lain Ian Liddell-Grainger, Baroness Hooper, Lord Jackson of Peterborough, Lord Kempself, dan Lord Rennard menyampaikan minatnya untuk memperkuat kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan serta kerjasama di bidang energi berkelanjutan dan penanggulangan krisis iklim dengan Indonesia.



Gambar 3.6
Hon. Mrs.
Dame Karen
Bradley
memimpin
pertemuan
bilateral
parlemen
Kerajaan
Inggris dengan
BKSAP DPR RI

Menanggapi hal ini, delegasi DPR RI yang dalam pertemuan bilateral ini dipimpin oleh Dr. Fadli Zon mengapresiasi komitmen Inggris dalam memperkuat kerjasama bilateral dengan Indonesia melalui jembatan diplomasi parlemen. Di samping itu, ia juga menyampaikan secara tegas apresiasinya atas posisi Inggris yang menghormati kedaulatan Indonesia.



Gambar 3.7 Penguatan demokrasi dan Pembangunan berkelanjutan baik dalam sektor lingkungan, energi terbarukan, dan ekonomi hijau menjadi prioritas kerja sama antara DPR RI dan Parlemen Kerajaan Inggris

Dr. Fadli Zon juga berharap agar dapat terwujud kerjasama yang kuat antara DPR RI dengan Parlemen Inggris, utamanya dalam upaya bersama memperkuat demokrasi dan mendorong terwujudnya pembangunan berkelanjutan baik dalam sektor lingkungan, energi terbarukan, dan ekonomi hijau.

Dalam kesempatan ini, Dr. Fadli juga menyampaikan terkait kerjasama yang telah terjalin antara DPR RI dan *Westminster Foundation for Democracy* (WFD), sebagai salah satu lembaga publik Inggris, dalam bidang seperti penguatan demokrasi dan peningkatan akuntabilitas parlemen melalui berbagai kegiatan antara lain yakni capacity building.

Hon. Mrs. Dame Karen Bradley bersama seluruh parlemen Inggris yang hadir dalam pertemuan ini berharap agar interaksi parlemen Inggris dan Indonesia dapat terus ditingkatkan guna memperkuat kerjasama bilateral yang telah terbangun.

5. PERTEMUAN BILATERAL DENGAN PARLEMEN AUSTRALIA

Delegasi DPR RI melakukan pertemuan dengan Parlemen Australia, pada Senin (25/3), di Salle Nyon, CCV, CICG. Delegasi DPR RI diwakili oleh Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon; Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Sukamta dan Putu Supadma Rudana. Kedua delegasi mendiskusikan upaya memperkuat solidaritas IPU, khususnya kelompok Geopolitik Asia Pasifik (Asia Pacific Group).

Parlemen Australia, yang diwakili Ketua Delegasi Senator Deborah O'Neill didampingi beberapa anggota parlemen seperti Hon. Mr. Julian Hill dan Senator Ms. Linday Reynolds, memandangkan DPR RI dapat menjadi jembatan antar kelompok geopolitik dalam situasi perdebatan yang memanas seperti pembahasan *emergency item* terkait Palestina. Parlemen Australia menyesalkan tidak adanya keputusan bulat dari IPU untuk *emergency item* Gaza. Delegasi DPR RI juga menyesalkan tidak bulatnya suara IPU dalam isu Gaza dan sepakat ke depan perlu berkomunikasi lebih intensif termasuk dengan Australia agar dapat menjadi jembatan seluruh kelompok geopolitik.



Gambar 3.8 Senator Deborah O'Neill dari Parlemen Australia dengan para pimpinan BKSAP DPR RI. Kedua delegasi mendiskusikan upaya memperkuat solidaritas IPU, khususnya kelompok Geopolitik Asia Pasifik (Asia Pacific Group).



Gambar 3.9 Parlemen Australia dengan DPR RI terus berkomitmen untuk mempererat 75 tahun hubungan bilateral antara kedua negara

Indonesia dan Australia pada 2024 ini merayakan 75 tahun hubungan bilateralnya. Sejumlah kerja sama semakin kuat terjalin yang juga ditunjukkan dengan frekuensi saling kunjung pemimpin kedua negara yang cukup tinggi dan berlangsung setiap tahun. Pada kesempatan tersebut, Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon, juga menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi PM Albanese terhadap Pemilu 2024 dan ucapan selamatnya kepada Presiden terpilih. PM Albanese termasuk salah satu yang pertama mengucapkan selamat. Ini menunjukkan hubungan yang kuat antara Indonesia dan Australia dan akan semakin kuat ke depan.

6. PERTEMUAN BILATERAL DENGAN UN REFUGEE RELIEF AND WORKS AGENCY FOR PALESTINE REFUGEE IN THE NEAR EAST (UNRWA)

Delegasi DPR RI diwakili oleh Ketua BKSAP DPR RI, Dr Fadli Zon; Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Sukamta dan Putu Supadma Rudana juga melakukan pertemuan dengan wakil *UN Refugee Relief and Works Agency for Palestine Refugee in The Near East (UNRWA)*, pada Senin (25/3), pukul 17.30 di Room 2, -1 Floor, CICG, Geneva.

UNRWA yang diwakili *Chief of Staff*, Mr. Ben Majekodunmi dan *Director for UNRWA Representative Office for Europe*, Mrs. Marta Lorenzo Rodriguez, menyampaikan apresiasi terhadap Indonesia atas dukungan politik dan moralnya. UNRWA juga menceritakan tantangan situasi yang saat ini dihadapinya, yakni tekanan politik dari satu negara tertentu. Padahal UNRWA adalah lembaga yang dibentuk sebagai mandat dari negara-negara anggota PBB melalui Majelis Umum PBB.



Gambar 3.10 Delegasi *UN Refugee Relief and Works Agency for Palestine Refugee in The Near East* (UNRWA), Mr. Ben Majekodunmi dan Mrs. Marta Lorenzo Rodriguez, menginformasikan situasi yang terjadi saat ini di perbatasan Rafah Mesir dan Gaza

UNRWA berharap negara-negara yang konsisten mendukung untuk dapat secara kolektif berkumpul dan menciptakan kepemimpinan yang kuat untuk memastikan keberlangsungan lembaga tersebut. UNRWA adalah lembaga yang dibentuk untuk memberi layanan dasar kepada para pengungsi Palestina yang tercerabut sejak konflik muncul di kawasan tersebut.

UNRWA menginformasikan situasi yang terjadi saat ini di perbatasan Rafah Mesir dan Gaza. Pengungsi Palestina berhimpitan dan tidur di berbagai tempat. Tiap tempat hunian (*shelter*) dapat ditinggali hingga lebih dari 30.000 warga. Mereka pun hanya menggunakan tiga hingga empat toilet per *shelter*. Anak-anak juga mulai kekurangan gizi.

Sementara dalam jarak 30-50 menit dari lokasi, yakni di kawasan Israel, ada tempat yang sangat aman dan segala fasilitas tersedia dengan penuh. UNRWA menyatakan kedua kawasan tersebut sangat berbeda dan kontras dalam segala hal.

Delegasi DPR RI menyatakan komitmen dan dukungannya untuk UNRWA dan bahkan meningkatkan kontribusi ke UNRWA hingga tiga kali lipat sebagaimana dinyatakan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Delegasi DPR RI juga menginformasikan rencana kunjungan ke Gaza dan menyesalkan situasi tidak bulatnya IPU untuk *emergency item*.

Di sisi lain Delegasi DPR RI juga menegaskan kontribusi zakat juga signifikan untuk dapat mendukung eksistensi UNRWA. Delegasi DPR RI berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi zakat tersebut untuk mendukung bantuan kemanusiaan Indonesia ke Palestina.



Gambar 3.11 DPR RI berkomitmen untuk , Dr. (HC) Puan Maharani dan Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon dalam sidang IPU148 di Jenewa, Switzerland

III KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pertemuan IPU ke-148 di Jenewa, Swiss, berjalan lancar dan penuh dengan perdebatan dengan fokus terutama pada situasi konflik dan kemanusiaan di Gaza.
2. Debat *emergency item* terkait situasi Gaza gagal mengambil keputusan dengan titik perdebatan pada isu tahanan politik atau tahanan perang. Isu utama lainnya yakni desakan gencatan senjata permanen, dibukanya akses bantuan kemanusiaan, pelepasan sandera dan kepatuhan pada hukum internasional dapat disepakati.
3. Komite Eksekutif IPU akan bertemu kembali sekitar Juni 2024 di luar jadwal *Assembly* dengan lokasi dan waktu yang masih tentatif.
4. Komite Isu Timur Tengah IPU akan melakukan kunjungan ke Palestina dan Israel dalam waktu secepatnya.
5. Task Force Ukraina akan kembali berkunjung bersama Presiden IPU ke Kyiev dan Moskow dengan jadwal ditentukan kemudian.
6. Komisi Pembangunan Berkelanjutan IPU menyepakati resolusi *Partnership for climate action: Promoting access to affordable green energy, and ensuring innovation, responsibility and equity* dengan usulan DPR pada (i) penegasan peran parlemen dalam legislasi, (ii) penekanan prinsip keadilan dan juga penegasan perlunya transfer teknologi tidak hanya pengembangan teknologi, dan (iii) perlunya parlemen berinteraksi dengan pemangku kepentingan global terkait keuangan iklim terakomodasi dengan baik.
7. Agenda persidangan pada Komisi Pembangunan Berkelanjutan pada pertemuan IPU ke-149 akan fokus pada *Parliamentary strategies to mitigate the long-Lasting impact of conflicts, including armed conflicts, on sustainable development*.
8. Pertemuan dengan UNRWA bermanfaat untuk mengkonsolidasikan dukungan Indonesia ke lembaga kemanusiaan PBB khusus pengungsi Palestina tersebut.

B. SARAN

1. Mempertimbangkan jadwal penyelenggaraan IPU ke-149 berlangsung pada Oktober 2024, saat periode keanggotaan baru dimulai, DPR RI dapat mengirimkan Delegasi Parlemen Indonesia yang terdiri dari anggota Delegasi IPU 148 / anggota BKSAP periode 2019-2024 yang terpilih kembali.
2. DPR RI untuk dapat kembali memperjuangkan *emergency item* terkait Gaza di pertemuan IPU ke-149.
3. BKSAP untuk dapat memastikan kesiapan anggaran mendukung misi IPU yang memiliki anggota BKSAP sebagai delegasi misi yakni: Komite Eksekutif IPU, Misi Komisi Isu Timur Tengah ke Palestina dan Israel, dan Task Force Ukraina.
4. Sekretariat BKSAP DPR RI untuk dapat menerjemahkan resolusi yang disepakati oleh IPU dan memastikan pendistribusiannya ke komisi yang terkait.
5. BKSAP untuk dapat memastikan persiapan teknis dan substansi untuk pertemuan IPU ke-149 berikutnya.
6. BKSAP dapat mengadakan rapat lanjutan dengan mengundang Baznas, Lembaga Amil Zakat dari organisasi masyarakat (Ormas) Islam seperti NU dan Muhammadiyah untuk mengkonsolidasikan dukungan terhadap UNRWA.



IV PENUTUP

A. UCAPAN TERIMA KASIH

Delegasi DPR RI menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran tugas Delegasi sehingga misi Delegasi di Sidang IPU ke-148 di Jenewa, Switzerland; termasuk dukungan substansi dan pendampingan selama persidangan. Delegasi DPR RI mengharapkan kerja sama ini akan semakin erat pada Sidang IPU selanjutnya.

B. KETERANGAN LAMPIRAN

Laporan ini dilengkapi oleh lampiran hasil-hasil persidangan sebagai berikut:

- Tautan *List of Participants*
<https://www.ipu.org/file/18892/download>
- Tautan *Geneva Declaration & Resolutions*
<https://www.ipu.org/event/148th-assembly-and-related-meetings#event-sub-page-32686>
- Tautan Butir Wicara
<https://www.ipu.org/event/148th-assembly-and-related-meetings#event-sub-page-32692>
- Tautan Hasil Sidang IPU ke-148
<https://www.ipu.org/file/19187/download>

C. ANGGARAN

Kegiatan partisipasi Delegasi DPR RI pada Sidang IPU ke-148 ini menggunakan anggaran APBN dari anggaran perjalanan dinas yang telah dialokasikan pada DIPA Satuan Kerja Dewan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 2.686.908.769 (Dua Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah)

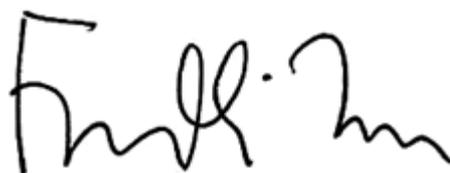


D. KATA PENUTUP

Demikianlah Laporan Delegasi DPR RI menghadiri Sidang IPU ke-148 yang telah diselenggarakan secara fisik pada tanggal 23-27 Maret 2024 di Jenewa, Switzerland. Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajiban Parlemen untuk terbuka dan transparan kepada publik.

Jakarta, 27 Maret 2024

A.n. Ketua Delegasi,



Dr. Fadli Zon, S.S., M.Sc
A-86





Produced by:

COMMITTEE FOR INTER-PARLIAMENTARY COOPERATION
INDONESIAN HOUSE OF REPRESENTATIVES
(BKSAP DPR RI)

Email: biro_ksap@dpr.go.id

Phone: (62-21) 5715813

ksap.dpr.go.id



@bksapdpr



@bksapdpr



bksapdpr



bksapdpr